

PROBANK

MEMBANGUN PERBANKAN PROFESIONAL

No. 139 | Tahun XXXVI | Oktober - Desember 2019

**Ekonomi
Dunia Masih
Melambat**

**Haru Koesmahargyo:
Tiga Jurus
Hadapi Fintech**

**Waktunya Konsolidasi
demi Perkuat Industri**



AYO ke BANK

**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Badan Pengurus Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Sekretaris Jenderal Perbanas

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Ketua Bidang Humas Perbanas

REDAKTUR PELAKSANA

Achmad Friscantono

SIRKULASI

Wara Sri Indriani
Adrian Burhan

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN**Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN
PPG/STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Memaknai IBEX 2019

“Perkembangan teknologi menjadi sesuatu yang tidak terdendung lagi dan selalu berkembang”. Komentar salah seorang bankir pada 2010 dalam perhelatan tahunan yang diselenggarakan Perbanas tersebut menjadi sebuah kenyataan yang dihadapi pelaku industri perbankan saat ini. Perhelatan tahunan yang dimaksud ialah The Asia Pacific Conference and Exhibition (Apconex). Pada 2011 Apconex berubah nama menjadi Indonesia Banking Expo (IBEX).

Pada prinsipnya, baik Apconex maupun IBEX diselenggarakan supaya industri perbankan dan jasa keuangan memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tema yang disusun IBEX setiap tahun selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan industri jasa keuangan. IBEX 2019 mengangkat isu utama teknologi.

Kecepatan perkembangan teknologi, seperti yang diungkapkan salah satu bankir di atas, harus disikapi pelaku industri perbankan dan jasa keuangan dengan baik. Teknologi bukan sekadar memenuhi tuntutan pengguna jasa keuangan. Lebih dari itu, teknologi seyogianya membuat proses bisnis menjadi lebih efisien dan efektif.

Teknologi kini telah menjadi kebutuhan. Tidak hanya bagi pelaku industri keuangan seperti perbankan, tapi juga hampir semua pelaku bisnis. Kendati demikian, kenyataannya masih ada segelintir nasabah yang sepertinya masih enggan memanfaatkan teknologi yang kini telah menjadi sebuah keniscayaan. Masih ada nasabah yang melakukan transaksi secara konvensional.

Melihat hal demikian, pelaku perbankan harus terus-menerus melakukan inovasi, yang muaranya adalah kepuasan nasabah. Untuk memberikan kepuasan kepada mereka, perbankan harus memberikan proses layanan yang lebih cepat serta lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Konstruksi industri keuangan di Tanah Air kini sedikit bergeser setelah munculnya *financial technology* (*fintech*). Kehadiran *fintech* menciptakan tantangan tersendiri bagi pelaku industri perbankan. Seorang bankir mengatakan, *fintech* bisa disebut pesaing, bisa juga tidak. Yang pasti, kehadiran *fintech* sedikit banyak berpengaruh pada perkembangan industri perbankan. *Fintech* memiliki sisi positif yang mungkin tidak dimiliki bank. Sisi inilah yang sebaiknya digali perbankan. Dengan bergandengan, melakukan sinergi, bank dan *fintech* bisa saling menguntungkan.

Fintech menawarkan kemudahan dan hal ini menjadi pilihan bagi generasi milenial yang memang lekat dengan teknologi. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan akan rumah, kaum milenial mempertimbangkan *fintech* dan perusahaan pembiayaan sebagai sumber pendanaan. Dalam beberapa tahun terakhir perbankan sudah menggandeng kedua industri itu untuk menyediakan kredit pemilikan rumah (KPR). Masalah ketersediaan perumahan banyak dibahas dalam perhelatan “Indonesia Mortgage Forum 2019” yang diselenggarakan Perbanas dan Indonesia Mortgage Bankers Association (IMBA) pada 17 Oktober 2019. Forum ini berhasil merumuskan beberapa rekomendasi untuk *stakeholders mortgage*.

Kembali ke masalah IBEX, IBEX 2019 menjadi ajang penutup tahun bagi pelaku industri perbankan. Dari ajang ini disusun konsep layanan nasabah industri keuangan. Melihat tuntutan yang selalu berubah di masyarakat, industri perbankan dan jasa keuangan lainnya harus selalu menyesuaikan. Dinamika ini menjadi bagian dari pekerjaan rumah industri perbankan di Tanah Air. ■



Dari Redaksi 1

Perbanas Utama

Waktunya Konsolidasi demi Perkuat Industri3
 Perbankan dan industri keuangan lainnya harus berkolaborasi supaya dampak yang diberikan sektor keuangan terhadap perekonomian nasional lebih signifikan. Pemerintah dan regulator pun perlu mengambil peran untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor keuangan.



Indonesia Banking Expo 2019: Membaca Arah Perbankan ke Depan6

Konsolidasi Menjadi Kunci8
 Regulator mendorong pihak perbankan melakukan konsolidasi untuk menciptakan industri perbankan yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Pentingnya Bank Membangun Ekosistem9

Profil

Haru Koesmahargyo
 Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Wakil Sekretaris Jenderal Perbanas

Tiga Jurus Hadapi Fintech12
Fintech hadir memenuhi kebutuhan masyarakat. Lebih mudah dan cepat menjadi dua keunggulan yang ditawarkan *fintech*, yang sangat cocok dengan gaya kaum milenial. Bagaimana strategi bank agar bisa berjalan beriringan dengan *fintech*?



Liputan Khusus

Stimulus untuk Gairahkan Perekonomian 15

Ekonomi Dunia Masih Melambat16
 Perlambatan ekonomi global masih akan dirasakan dalam beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun diperkirakan berada di posisi 5,1%-5,3% pada 2020. Pemerintahan baru dihadapkan pada tantangan membenahan regulasi dan pengembangan SDM.



Mengintip Pasar Milenial dan Pasar Informal 18

Mencari Solusi Mortgage20
 Generasi milenial dan sektor informal adalah dua kelompok yang menjadi pasar potensial properti saat ini. Untuk menyasar mereka perlu beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dua kelompok ini.



Sekilas Berita

IBEX 2019
Tidak Hanya untuk Sektor Perbankan21

Kerja Sama Perbanas Jabar dengan Perguruan Tinggi22

Ibadah Sambut 202023

Sosialisasi PSAK 71 dan 7324

Suplemen

Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT Jotun10

Waktunya Konsolidasi demi Perkuat Industri



Perbankan dan industri keuangan lainnya harus berkolaborasi supaya dampak yang diberikan sektor keuangan terhadap perekonomian nasional lebih signifikan. Pemerintah dan regulator pun perlu mengambil peran untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor keuangan.

Indonesia Banking Expo (IBEX) 2019" sukses digelar di Jakarta pada 6 November 2019 lalu. Perbanas selaku penyelenggara melakukan beberapa perubahan pada IBEX kali ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. IBEX 2019 mengambil tema "*Consolidate to Elevate*" dan melibatkan berbagai pelaku industri keuangan.

Selaras dengan tema yang diusung, IBEX 2019 bertransformasi dengan mengajak dan merangkul pelaku industri *multifinance*, asuransi, *financial technology (fintech)*, dan lainnya untuk berpartisipasi dalam diskusi soal pengembangan sektor keuangan ke depan. Konsolidasi di

sektor keuangan sekarang ini diyakini tidak hanya menjadi isu di industri perbankan. Kolaborasi antarindustri keuangan ini digagas supaya kontribusi sektor keuangan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia meningkat signifikan.

"Supaya *at the end of the day* tidak perlu ada kompetisi di antara berbagai industri keuangan, karena semua (masing-masing) punya porsinya dan kita harus kerja sama dengan baik. Jadi, supaya sumbangan industri keuangan ke dalam *gross domestic product (GDP)* bisa diangkat lebih besar lagi. Karena, boleh dibilang sumbangan industri keuangan di Indonesia terhadap *GDP* mungkin masih rendah daripada



Ahmad Siddik Badruddin;
tak perlu kompetisi

industri keuangan di negara lain,” papar Ketua Steering Committee IBEX 2019, Ahmad Siddik Badruddin.

Dalam IBEX 2019 Perbanas memberikan rekomendasi Layanan Keuangan di Nusantara kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir sebagai *keynote speaker*. Rekomendasi dalam bentuk buku tersebut memuat pokok-pokok pemikiran industri keuangan Indonesia 2025. Termasuk langkah-langkah dalam mengarahi perubahan saat ini dan masa depan. Rekomendasi tersebut bisa menjadi *guidance* bagi *key stakeholder* di sektor perbankan, konsolidasi sektor keuangan, dan bisnis *fintech* dalam menciptakan ekosistem keuangan yang kuat, efektif, dan efisien.

Penyusunan buku rekomendasi tersebut melibatkan industri perbankan, *payment system*, *fintech*, *multifinance*, asuransi, dan pelaku industri keuangan lainnya. Pokok Pemikiran Layanan Jasa Keuangan Nusantara itu disusun dari hasil *focus group discussion (FGD)* yang digelar sebanyak lima kali sepanjang September-Oktober 2019. Tema yang diusung dalam lima *FGD* tersebut masing-masing ialah *Future of Payments*, *Future of Regulations*, *Future of Indonesia Banking*, *How to Develop Non Banking Service*, dan *Fostering Banking Consolidation*.

IBEX 2019 juga diisi dengan sejumlah diskusi panel terkait dengan Indonesia Banking 2025, perdebatan soal bank konvensional, layanan digital, dan investor, penciptaan ulang

perbankan untuk ekosistem dunia, serta cara pembayaran masa depan. Diskusi panel tersebut dihadiri oleh para *leader* di industri keuangan, antara lain Direktur Utama BRI, Sunarso; *CEO* Maybank Indonesia, Taswin Zakaria; Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja; Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heru Kristiyana; *Global Head Strategy* Paypal, Alfonso Villanueva; *Managing Director* DBS, Pearlyn Phau; *President* Traveloka Group Operations, Henry Hendrawan; serta *CEO* One Connect Financial Technology, Bin Ru.

Butuh Dukungan Pemerintah dan Regulator

Industri keuangan saat ini tengah mengarahi gelombang transformasi, termasuk digitalisasi. Siddik menilai, transformasi industri keuangan dari Perbanas melalui Layanan Keuangan di Nusantara harus membawa industri ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, semua itu membutuhkan dukungan dari regulator agar Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain. Pemerintah juga perlu mengambil peran dalam mengimplementasikan infrastruktur terbaik. Indonesia perlu mempertimbangkan untuk melakukan deregulasi keharusan menyimpan informasi di *private cloud*, membolehkan bank beralih ke *e-KYC* tanpa tatap muka, memperbaiki infrastruktur data nasional, dan membangun basis data biometrik.

“Kita juga perlu memupuk inovasi dengan menciptakan layanan satu pintu terhadap semua regulator seperti Bank Indonesia (BI) dan OJK, merevisi *dual-sandbox* BI dan OJK, mengubah mekanisme persetujuan dari *universal rule-based approval* ke *tiered risk-based approval*. Selain itu, menetapkan persetujuan peraturan mengenai digital yang tidak saling bertentangan tetapi dapat menggantikan peraturan lama sebelum teknologi baru muncul di pasar,” imbuh Siddik.

Wakil Ketua Umum Perbanas, Farid Rahman, menambahkan, layanan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penyedia layanan keuangan, baik perbankan maupun institusi keuangan

lain, memiliki peran penting dalam melakukan empat fungsi sosial utamanya. Keempat fungsi tersebut adalah membiayai perekonomian untuk membantu permodalan infrastruktur dan bisnis, melindungi masyarakat lewat tabungan dan asuransi, mendukung perdagangan melalui layanan pembayaran baik luring (*offline*) maupun daring (*online*), dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui edukasi keuangan kepada masyarakat.

“Melihat peran tersebut dan semakin berkembangnya layanan keuangan, maka sektor keuangan harus mampu berinovasi, tidak hanya melihat tantangan dengan pendekatan tradisional. Untuk itu, kami memperkenalkan Layanan Keuangan di Nusantara sebagai bentuk rekomendasi kami kepada pemangku kebijakan untuk bersama-sama memperkuat industri keuangan Indonesia,” katanya.

Berdasarkan data Perbanas, kontribusi langsung sektor keuangan terhadap PDB Indonesia mencapai US\$44 miliar. Kontribusi tidak langsungnya, seperti penyaluran pembiayaan bagi pengusaha dan rumah tangga, mencapai US\$400 miliar.

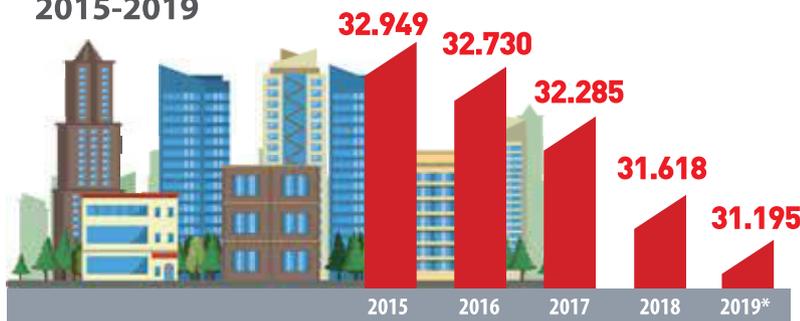
Masih kata Farid, dalam Layanan Keuangan di Nusantara ada beberapa rekomendasi yang dapat langsung diterapkan industri, seperti mendorong inovasi serta meningkatkan kolaborasi dalam sektor keuangan. Demi mendukung Layanan Keuangan di Nusantara, pihak perbankan akan turut aktif membantu pemerintah, utamanya dalam peningkatan kualitas layanan. Tak terkecuali lewat pengembangan teknologi digital dalam pelayanan perbankan.

“Agar Indonesia terhindar dari *middle income trap* maka diperlukan layanan keuangan merata. Ini ada peluang dan strategi. Sektor finansial akan terus mendorong inklusi agar tercapai,” Tigor M. Siahaan.

JUMLAH BANK UMUM 2015-2019



JUMLAH KANTOR BANK UMUM 2015-2019



Keterangan: * September 2019

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jokowi mencontohkan kolaborasi antarbank BUMN dalam menyediakan ATM Bersama. Kolaborasi antara industri perbankan dan lembaga nonbank juga menjadi perhatian Jokowi untuk mendorong terciptanya sektor keuangan yang kuat. Bank bisa menjalin sinergi dengan asuransi ataupun *fintech*.

“Asuransi juga harus menyiapkan diri dalam persaingan ketat dan sengit di tengah perkembangan digital sistem. Bank dan nonbank harus berkolaborasi. Jangan sendiri-sendiri,” tegas Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengimbau OJK untuk membuat kebijakan terkait dengan insentif dan disinsentif untuk perbankan agar lebih mudah melakukan ekspansi, khususnya ke daerah-daerah pelosok, dan melakukan pembiayaan sektor UMKM. Hal ini perlu dilakukan agar tercapainya inklusi dan literasi keuangan, salah satunya lewat peningkatan akses kredit untuk UMKM.

Di lain pihak, Wakil Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju, Suahasil Nazara, meminta industri perbankan nasional untuk terus mendorong dan meningkatkan perannya dalam perekonomian Indonesia. Perbankan merupakan komponen terbesar dalam sektor keuangan Indonesia. Porsinya mencapai 80%.

Suahasil mengatakan, ada tiga perbaikan yang bisa dilakukan pelaku industri perbankan saat ini. Pertama, pendalaman pasar keuangan. Ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama perbankan, regulator, dan pemerintah. Kedua, perluasan inklusi keuangan. Menurutnya, jika perbankan turut mendorong inklusi keuangan, dampaknya pun akan kembali ke industri perbankan.

“*Financial inclusion* adalah bisnis yang menjanjikan di masa mendatang. Apalagi masyarakat kita 250 juta lebih dan pendapatannya naik terus,” tegasnya.

Terakhir, ketahanan dunia keuangan. Di aspek ini pemerintah turun tangan dengan membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri atas Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). ■

“Seiring dengan perkembangan, kami akan bertransformasi dengan meningkatkan *experience* dan kualitas layanan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dengan mendidik 2,5 juta talenta di sektor keuangan terkait dengan teknologi digital dan keahlian baru lainnya hingga 2025,” pungkas Farid.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Perbanas, Tigor M. Siahaan, mengatakan, industri perbankan akan terus mendorong tingkat inklusi keuangan nasional. Layanan keuangan yang merata di Tanah Air akan menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong Indonesia keluar dari negara berpendapatan menengah.

Perbanas sebagai asosiasi perbankan, kata Tigor, akan terus mengingatkan pihak perbankan untuk dapat menyentuh masyarakat yang belum tersentuh industri keuangan (*bankable*). Layanan keuangan yang belum merata menyebabkan banyak anggota masyarakat enggan berhubungan dengan bank.

Pesan Pemerintah untuk Sektor Keuangan

Presiden Jokowi yang menjadi *keynote speaker* dalam acara tahunan yang dihelat Perbanas tersebut menyampaikan beberapa catatan bagi industri keuangan, khususnya perbankan. Pertama, dia meminta industri perbankan

**“Bank dan nonbank harus berkolaborasi. Jangan sendiri-sendiri,”
Presiden Jokowi.**

menurunkan suku bunga kredit selaras dengan langkah bank sentral yang sudah memangkas suku bunga acuan. Penurunan suku bunga, katanya, akan mendorong penyaluran kredit, khususnya ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia juga meminta industri perbankan menjalankan bisnis dengan efisien.

Indonesia Banking Expo 2019: Membaca Arah Perbankan ke Depan

Era digital mengubah pola bisnis industri jasa keuangan. Dengan perilaku bisnis seperti sekarang, diperkirakan peta industri jasa keuangan beberapa tahun ke depan berubah. Apa rekomendasi IBEX 2019 untuk para pemangku kepentingan dan pelaku industri jasa keuangan?

Perbanas menggelar “Indonesia Banking Expo (IBEX) 2019” di Hotel Fairmont Jakarta pada 6 November 2019. Kali ini mengusung tema “*Consolidate to Elevate*”. Dengan mengusung tema tersebut, pelaku industri jasa dan lembaga keuangan diharapkan dapat berusaha meningkatkan peran serta dalam membangun dan meningkatkan perekonomian Tanah Air ke depan.

IBEX 2019 menghasilkan rekomendasi untuk para pemangku kepentingan (*key stakeholders*) industri perbankan berupa pokok-pokok pemikiran layanan jasa keuangan di Tanah Air dalam menghadapi perubahan saat ini dan pada masa yang akan datang, termasuk konsolidasi di sektor keuangan dan bisnis *financial technology* (*fintech*). Berdasarkan rekomendasi tersebut, *key stakeholders* dapat

mengambil langkah-langkah untuk menciptakan ekosistem keuangan yang kuat, efektif, dan efisien.

Rekomendasi yang tertuang dalam Pokok Pemikiran Layanan Jasa Keuangan Nusantara itu diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan pemerintah untuk pengembangan industri keuangan di Tanah Air ke depan. Selain bank, penyusunan rekomendasi tersebut melibatkan pelaku dari *payment system*, *fintech*, *multifinance*, asuransi, dan industri jasa keuangan lainnya lewat Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada September-Oktober 2019. IBEX 2019 diisi dengan beberapa sesi diskusi yang melibatkan pelaku industri jasa keuangan.

Bagaimana pendapat bankir terhadap pelaksanaan IBEX 2019? Apa harapan, strategi, dan bayangan mereka terhadap industri perbankan negeri ini ke depan?

Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA

Dampak paling signifikan dari perkembangan teknologi bagi dunia perbankan ke depan menurut Jahja Setiaatmadja adalah dalam hal transaksi. Menurutnya, transaksi akan lebih didominasi oleh digital dan teknologi. Ke depan, jika dibayangkan, dengan teknologi yang berkembang demikian luas, maka yang paling mengalami revolusi adalah dalam transaksi. Apalagi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sudah di-*launch* oleh Bank Indonesia.

Namun, Jahja meyakini bisnis perbankan secara keseluruhan serta bisnis korporasi dan usaha kecil menengah (UKM) masih tetap membutuhkan transaksi konvensional. Hanya, mungkin, dari *processing*-nya di bank itu akan sangat cepat. Di lain sisi, untuk masuk ke era digitalisasi juga diperlukan *man power* atau sumber daya manusia yang andal.

Sekarang ini *man power* dari dalam negeri maupun luar negeri menjadi satu hal yang diperebutkan. Yang ingin memiliki SDM dengan keahlian *data analyst* saat ini bukan hanya industri perbankan, *fintech* pun membutuhkan SDM dengan keahlian ini. Secara umum, Jahja menggambarkan ke depan semuanya akan menjadi superdigital.

Untuk bertahan pada era digitalisasi ini, perbankan harus mempunyai *super apps* yang bisa meng-*handle* segala macam kebutuhan nasabah. Tidak hanya melayani transaksi finansial tapi juga seluruh ekosistem yang ada bisa menjadi satu. Menurutnya, itulah pola perbankan yang akan dilihat dalam beberapa tahun mendatang.



Taswin Zakaria,
Presiden Direktur Maybank Indonesia

Taswin Zakaria memprediksi akan terjadi perubahan pesat terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam dunia perbankan pada 2025. Menurutnya, mungkin saja para pelaku perbankan akan menerapkan sistem yang berbeda dalam berbisnis karena saat ini telah memasuki era disrupsi digital.

Segala kemungkinan, menurutnya, bisa terjadi. Namun, Taswin menilai peralihan dari tenaga manusia ke robot kemungkinan belum bisa terwujud dalam waktu dekat dan itu masih terlalu jauh untuk dipikirkan. Misalnya, jika *customer service* dan *teller* digantikan robot, maka bank seperti menghilangkan sisi *human interest*-nya. Karena itu, pada 2025, perubahan yang mungkin terjadi di perbankan adalah dalam cara melakukan bisnis.

Tren transaksi perbankan pun mulai mengalami pergeseran. Dengan pertimbangan kepraktisan, nasabah lebih memilih bertransaksi menggunakan *e-banking* maupun *mobile banking*. Kendati demikian, Taswin meyakini masih banyak hal yang membutuhkan tenaga manusia.

Pekerjaan seperti mengetik, dulu mengetik menggunakan mesin ketik, tapi sekarang memakai laptop. Pekerjaan mengetik masih ada. Jadi, pekerjaan yang melibatkan manusia tentunya masih akan menjadi bagian dalam bisnis perbankan di masa mendatang. Tentunya tanpa menghilangkan penerapan teknologi.

Taswin memprediksi ke depan para pelaku bisnis perbankan akan menerapkan teknologi pada fungsi-fungsi manual. Jadi, elemen *human privilege* masih menjadi bagian bisnis bank ke depan. Namun, bank ke depan harus berubah menjadi *smart*. Beberapa kegiatan yang melibatkan manusia, seperti layanan konsultasi, tentunya tidak bisa digantikan robot. Kemungkinan bank akan *hybrid* menjadi *smart bank* di masa depan.



Sunarso,
Direktur Utama BRI

IBEX 2019 bagi Sunarso lebih memberikan penekanan yang spesifik, terutama tentang tantangan yang harus dihadapi industri perbankan. Dengan melihat tantangan ini, perbankan dan regulator dapat mengambil langkah untuk menyikapinya. Dari sini, industri perbankan sudah bisa menggambarkan bagaimana wajah industri ini dalam lima tahun ke depan.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana perbankan memerankan dirinya untuk *men-support* apa yang dibutuhkan negara dalam rangka menumbuhkan perekonomian. Semua konsep ini menjadi bahasan dalam IBEX 2019.

Beragam kemungkinan dapat terjadi terkait dengan peran perbankan. Bisa jadi semua bank mendapatkan tugas yang sama dan dikerjakan bersama-sama. Kemungkinan lainnya setiap bank diberi tugas yang spesifik dan kemudian dikolaborasi, dikoordinasikan dengan regulator. Pilihan pertama bisa jadi peran perbankan tidak efektif. Karena itu, akan lebih tepat kalau ada pembagian tugas dan masing-masing bekerja sesuai dengan kompetensinya.

Sunarso juga menyarankan, pelaksanaan IBEX mulai saat ini sampai dengan seterusnya bisa membahas tema dan permasalahan yang lebih spesifik dalam *address challenges* dan bagaimana strategi untuk menghadapinya. Harapannya, di kala industri menghadapi bisnis yang makin kompetitif, tetap bisa meraih sukses karena menemukan tantangan dan risiko yang spesifik.



Tigor M. Siahaan,
Direktur Utama CIMB Niaga

Saat ini Indonesia sedang terjebak sebagai negara berpendapatan menengah. Untuk ke luar dari jebakan ini, diperlukan strategi yang harus dilakukan oleh industri keuangan secara masif. Caranya, menurut Tigor, industri perbankan harus terus mendorong tingkat inklusi keuangan nasional. Dengan layanan keuangan yang merata, Indonesia diyakini dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Hal tersebut



menjadi peluang sekaligus strategi yang harus dimanfaatkan.

Perbanas sebagai asosiasi perbankan terus mengingatkan perbankan untuk dapat menyentuh masyarakat yang belum tersentuh industri keuangan (*bankable*). Layanan keuangan yang belum merata menyebabkan banyak masyarakat enggan berhubungan dengan bank. Perbankan juga diharapkan dapat terus menyalurkan kredit, khususnya ke pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Berdasarkan kajian dari asosiasi, sektor keuangan memiliki kontribusi yang besar.

Konsolidasi Menjadi Kunci

Regulator mendorong pihak perbankan melakukan konsolidasi untuk menciptakan industri perbankan yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

“Indonesia Banking Expo 2019 (IBEX 2019)” mengangkat tema “*Consolidate to Elevate*”, yang berarti konsolidasi untuk maju bersama. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat bahwa tema ini relevan dengan kondisi perekonomian dunia saat ini.

Ekonomi dunia memang sedang lesu. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2019 dan 2020 berturut-turut dari 3,2% menjadi 3,0% dan dari 3,5% menjadi 3,4%. Melambatnya perekonomian global ini juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2019 tercatat hanya mencapai 5,02% (*year on year*), melambat dibandingkan dengan 2018 yang sebesar 5,17%.

Meskipun begitu, Wakil Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Suahasil Nazara, menilai perekonomian dalam negeri masih cukup solid dan stabil. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, ia mengatakan, penting bagi regulator, pemerintah, dan industri keuangan saling bersinergi dan berkonsolidasi.

Di sektor keuangan, OJK mendorong konsolidasi perbankan untuk menciptakan industri perbankan yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Anggota Dewan Komisiner OJK, Heru Kristiyana, menjelaskan, konsolidasi ini nantinya tak hanya diwujudkan melalui peleburan antarbank tapi juga diperluas dengan pengambilalihan yang diikuti dengan pembentukan



Suahasil Nazara; solid dan stabil

kelompok usaha bank. Dengan cara ini, bank-bank kecil akan tetap mendapat kesempatan dan sekaligus diperkuat melalui sinergi dalam kelompok usaha bank besar.

Dalam beberapa tahun terakhir sejumlah bank di Indonesia sudah mengambil langkah konsolidasi. Terbukti, jumlah bank umum di Tanah Air menurun. OJK mencatat, terjadi penurunan jumlah bank dalam sepuluh tahun terakhir. Pada Agustus 2019 jumlah bank umum mencapai 111 bank, menurun dibandingkan dengan 2009 yang sebanyak 122 bank.

Heru menilai, konsolidasi perbankan adalah sebuah keniscayaan, yang akan membuat kemampuan adaptasi setiap bank menjadi lebih baik sehingga mampu

menghadapi tantangan global dan tuntutan inovasi layanan berbasis teknologi. Nantinya, konsolidasi ini akan membuat bank-bank nasional lebih tangguh di lingkup domestik, juga kompetitif di kancah global.

Hal senada disampaikan Deputy Komisiner Pengawas Perbankan 2 OJK, Boedi Armanto. Menurutnya, OJK memberi kesempatan kepada bank besar untuk berkolaborasi dengan bank kecil agar dapat menjangkau nasabah lebih jauh lagi.

“Intinya, kalau kita mau dan mampu berkompetisi dengan perbankan yang ada di regional dan internasional, kita harus mampu membesarkan diri,” tegas Budi.

Ke depan, Budi berharap bank-bank nasional dapat berkonsolidasi di bawah satu bendera. Ia mengakui bahwa hal tersebut tak mudah diwujudkan. Namun, jika memang tak bisa dilakukan, kolaborasi harus tetap menjadi pilihan utama. “Kami menginginkan bank tidak akan ketinggalan

dan bisa bersatu. Karena, bila bersatu *‘kan* lebih baik. Kalau tidak bisa, ya kolaborasi,” pungkas Boedi. ■

“Kami menginginkan bank tidak akan ketinggalan dan bisa bersatu. Karena, bila bersatu *‘kan* lebih baik. Kalau tidak bisa, ya kolaborasi.”

Pentingnya Bank Membangun Ekosistem

Masifnya perkembangan lembaga finansial berbasis teknologi (*fintech*) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah peta persaingan bisnis di sektor perbankan. Membangun ekosistem merupakan salah satu cara agar bank dapat bertahan.

Menghadapi persaingan bisnis yang makin sengit di sektor keuangan, perlu ide kreatif untuk mengembangkan sistem pembayaran digital serta mempererat kolaborasi sektor perbankan dan nonperbankan. Hal tersebut menjadi salah satu poin penting yang ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada acara “Indonesia Banking Expo (IBEX) 2019” pada 6 November 2019, di Jakarta.

Senada dengan Presiden Jokowi, pengamat ekonomi, Aviliani, mengatakan bahwa di era ketika teknologi berkuasa seperti sekarang ini, bank dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satu cara yang bisa dilakukan pelaku perbankan adalah berekosistem dengan *financial technology (fintech)*.

“Kalau bank tidak beradaptasi atau tidak berekosistem dengan mereka (*fintech*), maka marginnya akan makin turun sehingga *cost*-nya makin besar. Karena itu, ke depan eranya sektor perbankan itu berekosistem. *Sharing cost, sharing revenue*, sehingga saling *win-win*,” ujarnya di sela-sela acara IBEX 2019.

Aviliani menambahkan, dengan berkolaborasi dengan *fintech*, bank tidak harus mengeluarkan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur teknologi informasi (TI). Bank dapat menjangkau nasabah yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi *fintech*. Di lain pihak, *fintech* bisa mendapatkan pendanaan dari bank untuk melakukan pembiayaan.

Di tengah persaingan yang kian ketat, langkah bank kini kian berat. Menurunnya suku bunga dan tertekannya likuiditas membuat rasio margin bunga bersih atau *net interest margin (NIM)* yang diterima bank tergerus.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *NIM* industri perbankan trennya kurang menggembirakan dalam beberapa waktu terakhir. Per September 2019 *NIM* industri perbankan berada di posisi 4,90%, lebih rendah 24 *basis points (bps)* dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,14%. Demi menjaga profitabilitas, para bankir harus berpikir keras mencari pendapatan alternatif nonbunga.

Untuk bank-bank kecil, kini mereka makin menjerit. Selama ini bank-bank kecil, khususnya BUKU 1 dan 2, sangat mengandalkan margin bunga sebagai pendongkrak



Bank dan *fintech*; *sharing cost, sharing revenue*

profitabilitas banknya. Permodalan yang terbatas membuat bank-bank kecil ini sulit membangun infrastruktur untuk mengeruk sumber pendapatan lain selain bunga.

Munculnya *fintech* menambah masalah baru bagi bank kelompok BUKU 1 dan 2. Pasalnya, *fintech* juga menyasar segmen kecil dan menengah yang menjadi pasar bank kelompok BUKU 1 dan 2. “Pangsa pasar mereka (BUKU 1 dan 2) saat ini sudah dimasuki oleh *fintech*,” ujar Bhima Yudhistira A., pengamat ekonomi.

Bisnis *fintech lending* memang mengalami perkembangan cukup pesat. Menurut catatan OJK, pada September 2019 ada 127 *fintech lending* yang terdaftar dan berizin OJK. Pada September 2019 tercatat jumlah rekening *lender* sebanyak 558.766 entitas atau meningkat 169,28% dibandingkan dengan Desember 2018 (*year to date/ytd*) dan jumlah rekening *borrower* sebanyak 14.359.918 atau meningkat 229,40% (*ytd*). Akumulasi jumlah pinjaman *fintech lending* per September 2019 mencapai Rp60,41 triliun atau meningkat 166,51% (*ytd*). Sedangkan jumlah *outstanding* pinjaman per September 2019 sebesar Rp10,18 triliun atau meningkat 101,83% (*ytd*).

Untuk menghindari tergerusnya bisnis bank-bank kecil karena kehadiran *fintech*, Aviliani merekomendasikan bank-bank kecil untuk membentuk ekosistem. Hal itu bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan *fintech* maupun merger dengan bank lain. Di samping itu, Aviliani menyampaikan pentingnya regulator memberikan perhatian kepada bank-bank kecil ini. “Jangan sampai kejadian seperti Bank Century yang seharusnya tidak sistemik menjadi sistemik lantaran ditutup pada saat ekonomi sedang jatuh,” pungkasnya. ■



Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.03/2009, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015 tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. PT Jotun Indonesia, NPWP No. 01.071.174.5-052.000 yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok KK-1 Jatiwangi, Cikarang Barat Bekasi, dengan ini mengumumkan Piutang Yang nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun buku 2019 sebesar Rp. 17,068,248,349,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA DEBITUR	NPWP	ALAMAT	PLAFON UTANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH PIUTANG TIDAK TERTAGIH (Rp)
ANDHI PRANATA (DIAMOND INDAH)	06.286.318.8-724.000	JL. WR. SUPRATMAN NO. 05 (EX.JL. IR.SUKARNO) TANJUNG LAUT-BONTANG, BONTANG SELATAN	150.000.000	95.828.046
ANGGREK RUSLI	06.320.874.8-941.000	GALAY DUBU, PULAU-PULAU ARU, MALUKU TENGGARA	100.000.000	40.781.700
BUT. CHINA NATIONAL ELECTRIC EQUIPMENT CORPORATION (CNEEC)	02.072.328.4-053.000	WISMA PENTA LT.3 JL.KEBON SIRIH NO.65 MENTENG, JAKARTA PUSAT - DKI JAKARTA RAYA	300.000.000	224.567.750
BUT.BEIJING ELECTRIC POWER CON	21.033.353.0-029.000	APT. ISTANA HARMONI RUKO 2 L, KOMP HARMONI PLAZA BLOK.C-D LT II, JL.SURYOPRANOTO 2 GAMBIR, JAKARTA PUSAT	1.500.000.000	1.500.000.000
BUT. CCCC SECOND HARBOR CONSULTANTS Co.Ltd	02.072.414.2-053.000	APT.ISTANA HARMONI RUKO I-H KOMP:HARMONI PLAZA BLOK C-D JL.SURYOPRANOTO 2, GAMBIR, JAKARTA PUSAT	100.000.000	74.156.000
CV RATHI	02.866.523.0-815.000	JL KANCIL DUSUN II MACORILOLOE PELAMBUA, POMALAA, KAB KOLAKA	200.000.000	128.975.308
CV. AMARTA PRADIPTA UTAMA	31.299.777.8-413.000	JL. TARUM BARAT II RUKO SUNTER NIAGA MAS BLOK D.4 NO.08 JAYAMUKTI, CIKARANG PUSAT, BEKASI	50.000.000	28.955.300
CV. ANTA MEGA	21.143.777.7-429.000	JL.RENGAS DENGKLOK RAYA KELURAHAN ANTAPANI KIDUL, BANDUNG-JAWA BARAT	100.000.000	86.053.000
CV. ANUGRAH DHARMA TRISATNAVA	75.365.780.8-805.000	JL. RACING CENTER I NO.3 RT.001 RW.001 KARAMPUANG, PANAKUKKANG KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN	850.000.000	854.231.370
CV. BERLIAN JAYA MANDIRI	02.973.702.0-721.000	JL.PADAT KARYA KM.02 NO.26 RT.04 MUARA RAPAK-BALIKPAPAN UTARA, BALIKPAPAN	75.000.000	17.876.782
CV. BONTANG SOLO BERSAMA	01.409.205.0-724.000	JL.ANGKASA GG.MERPATI NO.10 A BAEBAS TENGAH, BONTANG 75323	100.000.000	19.743.350
CV. CIBA PERDANA MANDIRI	02.831.520.8-215.000	MASYEBA PERMAI BLOK L NO.17 PATAM LESTARI SEKUPANG - BATAM	50.000.000	23.140.000
CV. GOLDEN ARGO ABADI	31.780.627.1-413.000	PR GRAHA MUSTIKA MEDIA HT1 NO.12 RT.007 RT.010 LUBANG BUAYA, SETU - BEKASI	25.000.000	21.963.920
CV. KARYA MUDA PRATAMA	03.115.365.3-215.000	KOMP.BATAVIA SARAS SQUARE BLOK.E NO.23 SUNGAI LANGKAI SAGULUNG - BATAM 29400	50.000.000	8.520.200
CV. MANGGAR KREASI	31.392.528.1-432.000	CLUSTER MUSTIKA SARI BLOK E-8 RT 006 RW 001 KEL.MUSTIKASARI KEC.MUSTIKA JAYA - BEKASI	100.000.000	85.409.280
CV. MULTI CIPTA PERSADA	01.497.671.6-614.000	JL. ALBATROS KAV.4 KOMP.AURI RT.003 RW.001 PUTAT JAYA SAWAHAN - SURABAYA	50.000.000	16.282.176
CV. NISA	02.582.188.5-114.000	DSN X FIRDAUS, SEI RAMPAH, SERDANG BEDAGAI	50.000.000	24.605.240
CV. PERKASA WARNA	02.417.982.2-307.000	JL.TALANG KELAPA BLOK A NO.11 RT.001 RW.001 TALANG KELAPA ALANG ALANG LEBAR, PALEMBANG	300.000.000	203.998.577
CV. PINANG PERKASA	02.831.414.4-215.000	GRIYA PRATAMA BLOK H NO.40 BULIANG - BATU AJI, BATAM	100.000.000	94.657.385
CV. PINTU MAS	01.511.755.9-951.000	JL. SELAT KABU NO.14 REMU SELATAN-SORONG TIMUR KOTA SORONG	200.000.000	187.780.168
CV. SURYA CITRA TEKNIK	02.284.655.4-821.000	JL.PTENDAN KAW.MEGA MAS BLK.SMART VI NO.7 TITIWUNGEN SELATAN SARIO - MANADO	300.000.000	273.326.064
CV. WAHYU TAMA ABADI	03.188.371.3-721.000	JL.MARMA R ISWAHYUDI NO.08 RT.028 SEPINGGAN - BALIKPAPAN SELATAN BALIKPAPAN - 76115	30.000.000	18.681.520
CV. WARNA WARNI	03.115.963.5-831.000	JL. PUE BONGO NO.71 BALAROA-PALU BARAT KOTA PALU 94223	150.000.000	61.033.996
CV. ZAP UTAMA	03.079.606.4-805.000	BTN MINASA UPA BLOK.K NO.17 GUNUNG SARI, RAPPOCINI MAKASSAR - SULAWESI SELATAN	150.000.000	35.863.100
DONATUS THENDENS (DIREKTUR CV. PAPUA PERMAI)	15.174.836.5-951.000	JL.TAGE NO.47 KEL.KLAWASI RT.02 RW.02 RUFELI SORONG BARAT - KOTA SORONG	50.000.000	43.629.717
ELCOLITE	-	JL. INTAN II BLOK W NO.21 BATUCEPER INDAH TANGERANG	60.000.000	24.814.000
GUNUNG MAS	-	JL. KOM. YOS SUDARSO NO.78 PUTUSSIBAU - KALBAR	100.000.000	67.615.202
HARMONI	-	JL. JEND SUDIRMAN NO.33 TOBOALI - BANGKA SELATAN	100.000.000	51.815.202
KNS.PT BUMI RAMA NUSANTARA JO-ALTON (S) INT PTE-OJSC	02.957.848.1-704.001	RAYA JUNGKAT - GARDU INDUK 01 JUNGKAT, SIANTAN KAB.PONTIANAK 78351	50.000.000	36.598.980
MITRA BANGUNAN	-	JL.MOH.HATTA UENTANAGA BAWAH AMPANA, SULAWESI TENGAH	150.000.000	41.679.858
MUARO BANGUNAN	-	JL. SUTAN SYAHRIR TAROK BUKIT TINGGI	200.000.000	125.269.594
NURKUSUMA	-	JL. JENDRAL SUDIRMAN RT.4 RW.1 SUMBER PUCUNG, MALANG	60.000.000	53.824.405
PT MENTARI SEJATI PERKASA	01.716.179.5-631.000	JL. PERAK BARAT NO.231 PERAK UTARA, PABEAN CANTIAN, SURABAYA	100.000.000	54.683.900
PT PASCADANA PURATAMA	01.760.570.0-024.000	JI. JEND AHMAD YANI KAV.52 A KEL. CEMPAKA PUTIH KEC. CEMPAKA PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	300.000.000	124.826.811
PT. ADERN PUTRA PERSADA	02.746.181.3-402.000	JL.KAV.PEMDA IV NO.160 RT.04 RW.05 PANUNGGANGAN BARAT, CIBODAS	50.000.000	42.338.670
PT. ADI MAHA KUASA	02.901.918.9-417.000	LINK KOTAK MALANG NO.116 RT.001 RW.005 KEL.SURALAYA KEC.PULOMERAK CILEGON - BANTEN	300.000.000	276.741.250
PT. AGATE BUMI TANKER	02.741.997.7-064.000	GD.TRADA LT.3 JL.KYAI MAJA NO.4 RT.003/008 KEBAYORAN BARU-JAKARTA SELATAN	200.000.000	109.629.000
PT. AKMAL DJAYA KHATULISTIWA	02.448.169.9-444.000	KO.MANGLAYANG REGENCY D4 NO.17 RT 002 RW 026 CIMEKAR CILEUNYI, KAB.BANDUNG - JAWA BARAT	80.000.000	23.710.279
PT. ALRE UDAYA JAYA	31.391.707.2-905.000	PERUM GIRI HILL JL.PERMATA V.1 LINK MENESA, BENOA KUTA SELATAN - BADUNG	100.000.000	39.450.840
PT. ANSEMA LESTARI PRIMA	01.806.485.7-034.000	JL. SERUNI NO. 2 RT 10/01 CENGKARENG BARAT, CENGKARENG, JAKARTA BARAT 11730	150.000.000	31.301.799
PT. ANUGRAH INTERNASIONAL NUSANTARA	31.259.618.2-113.000	JL.SAMBU NO.27-23 GG.BUNTU MEDAN TIMUR, KOTA MEDAN	75.000.000	23.696.112
PT. ARKON PRIMA INDONESIA	01.002.829.8-055.000	JL. RAYA BEKASI KM. 24 PD. BOX 3161, JAKARTA 13960	800.000.000	736.463.412
PT. BOEDOET PRIMA GRAHA	02.836.644.1-024.000	JL.RAWASARI TIMUR DALAM I NO26 RT.008/002 KEL.CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKARTA PUSAT, KEC.CEMPAKA PUTIH	30.000.000	17.966.190
PT. BUMI SAKTI HARAPAN	31.401.654.4-411.000	VILLA PAMULANG MAS BLOK 1.6/15 RT.001 RW.008 BAMBUS APUS, PAMULANG, TANGERANG SELATAN, BANTEN 15415	50.000.000	13.354.220
PT. BURUNG LAUT	01.127.945.2-101.000	JL. JEND. ACHMAD YANI NO. 14 PELUNAYONG, KUTA ALAM, BANDA ACEH	80.000.000	62.590.000
PT. CENDANA INDAH	01.559.944.7-721.000	JL.MT.HARYONO GG.PLAMBOYAN DAMAI BALIKPAPAN SELATAN, BALIKPAPAN	80.000.000	46.877.067
PT. CIPTAKARYA BANGUN PERSADA MANDIRI	03.181.682.0-017.000	JL. RAYA TAMAN MARGASATWA KAV 2 NO.62 RT.011 RW.005 JATI PADANG - PASAR MINGGU	100.000.000	89.170.290
PT. CITRABARA BINAMANDIRI	01.710.648.5-021.000	JL. KH. WAHID HASYIM NO. 80 KEBON SIRIH JAKARTA PUSAT, 10340	250.000.000	212.535.451
PT. DIMAS KARYA PRAPTO	70.527.230.0-435.000	JL.KOLIBRI 4 HA-4 NO.10 RT.006 RW.017 KEL.MANGUN JAYA KEC.TAMBUN SELATAN BEKASI, JAWA BARAT	150.000.000	130.471.076
PT. DINAMIKA INTI PRIMA	03.216.641.5-721.000	JL.EMPAT NO.56 RT.035 GURUNG SAMARINDA, BALIKPAPAN, BALIKPAPAN UTARA 76125	75.000.000	54.297.958
PT. DWI PRIMA TRANSTEKNIKA	66.859.264.5-724.000	JL. POROS KABO NO.41 RT.010 KEL.SWARGA BARA, KEC.SANGATTA (UTARA) KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR	150.000.000	131.016.600
PT. EL DANTE KARYA SANJAYA	31.201.599.3-028.000	JL.TANAH ABANG IV NO.34-A PETOJO SELATAN - GAMBIR, JAKARTA PUSAT	50.000.000	28.880.280

NAMA DEBITUR	NPWP	ALAMAT	PLAFON UTANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH PIUTANG TIDAK TERTAGIH (Rp)
PT. ELITE ABOVE TOP	74.398.152.4-034.000	RUKAN CITY PARK BUSINESS DISTRICT (CBD) JL.KAMAL RAYA E1 NO.7 CENGKARENG TIMUR	100.000.000	6.930.000
PT. EPTCO DIAN PERSADA	02.160.955.7-062.000	GD. GRANADI, MENARA SELATAN LT. 6 JL. HR. RASUNA SAID OK X-1 KAV 8-9 KUNINGAN TIMUR SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	50.000.000	5.357.000
PT. FAST ENGINEERING INDONESIA	03.131.771.2-215.000	KOMPLEGENDA GEMILANG BLOK B NO.10-11 BALOI PERMAI BATAM KOTA, BATAM 29400	100.000.000	54.423.100
PT. GALANGAN MERCUSUAR	02.650.207.0-011.000	GD.MENARA GRACIA LT.8 JL.HR.RASUNA SAID KAV.C-17 KARET KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA RAYA 12940	5.000.000.000	4.083.528.288
PT. GATRAMAS INTERNUSA	02.106.680.8-046.000	JL. LATUMENTEN GROGOL PERMAI BLOK D NO.19,GROGOL PETAMBURAN, DKI JAKARTA RAYA, 11460	150.000.000	128.811.516
PT. HANDAL INDO SAMUDERA	02.380.731.6-042.000	JL.BUGIS NO. 20-22 KEBON BAWANG, TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA	300.000.000	234.452.779
PT. HARMONI REKA Cipta	66.548.187.5-411.000	KP.PONDOK KACANG NO.- RT.002 RW.005 KEL.PONDOK KACANG BARAT, KEC.PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN, BANTEN	50.000.000	25.754.850
PT. IMPRESI	03.225.955.8-821.000	JL.ADIPIURA LINGKUNGAN X PANIKI BAWAH MAPANGET, MANADO	80.000.000	59.027.540
PT. INTI SAKKA MANDIRI	31.785.395.0-428.000	JL.CIROYOM G9 IKHLAS NO.32/77 DUNGUSCARIANG - ANDIR BANDUNG 40183	500.000.000	443.962.486
PT. INTI SAKKA MANDIRI	31.785.395.0-428.000	JL.CIROYOM G9 IKHLAS NO.32/77 DUNGUSCARIANG - ANDIR, BANDUNG 40183	100.000.000	46.222.139
PT. IRAWAN PRIMA UTAMA	01.321.025.7-007.000	JL.PAHLAWAN NO.99 SENTUL - BOGOR JAWA BARAT	50.000.000	48.567.640
PT. KURNIA ALAM PUTRA SEKAWAN	02.547.157.4-307.000	JL.SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II GG.JAYA NO.18 RT.011 RW.001 ALANG ALANG LEBAR SUKARAMI, PALEMBANG	150.000.000	124.314.166
PT. LINTANG ANDALAN MAKMUR	02.211.257.7-641.000	JL.RAYA BY PASS KRIAN KM.32,3 KRATON KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR-61262	500.000.000	418.275.217
PT. MAJUS MAS SENTOSA	02.451.198.2-416.000	JL. HOS. COKROAMINOTO A.5 RT/RW 04/10 LARANGAN UTARA, LARANGAN, TANGERANG	50.000.000	24.287.340
PT. MANDALA PRIMA MANDIRI	01.986.361.2-417.000	KP.BAROKAH GANG 3 RT.03 RW.13 KEL.JOMBANG WETAN-KEC.JOMBANG CILEGON - BANTEN	200.000.000	165.156.253
PT. MANDALIKA SAKTI	31.153.947.2-414.000	JL. GATOT SUBROTO NO.79,RT.002 RW.008 KARANG ASIH, CIKARANG UTARA, BEKASI, JAWA BARAT-17530	150.000.000	121.267.766
PT. MANDIRI PRESSINDO	02.500.916.8-414.000	JL. KALENDERWAK NO.9 RT.003 RW.002 KARANGSARI, CIKARANG TIMUR, BEKASI-JAWA BARAT	100.000.000	66.687.500
PT. MARIO MIKRON METALINDO	02.510.293.0-432.000	JL. SILIWANGI KM.7 RT.002 RW.007 BOJONG MENTENG RAWA LUMBU, KOTAMADYA BEKASI	200.000.000	170.350.000
PT. MARULINES INTERNATIONAL INDONESIA	80.306.681.0-063.000	MENARA KARTIKA CHANDRA GEDUNG F LANTAI 4 RUANG 403-405 JL.JEND GATOT SUBROTO KAV.18-20 RT.005 RW.002 KARET SEMANGGI, SETIABUDI JAKARTA SELATAN	300.000.000	227.349.500
PT. MITRA ABADI SERVINDO	02.159.443.7-407.000	KOMP.PESONA ANGGREK BLOK DS NO.21 RT.04 RW.21 HARAPAN JAYA, BEKASI UTARA	50.000.000	16.026.408
PT. MITRINDO DUTA PRAKARSA	01.798.060.8-431.000	JL. DUSUN KELAPA NUNGGAL RT.26/RW.06, DS. GINTUNG KERTA KLARI, KARAWANG, 41371	400.000.000	386.681.971
PT. NUANSA INTI PERKASA	31.813.517.5-414.000	PERUM BCL JL.ROSELA IX BLOK A64 NO.37 RT.014 RW.012 WALUYA CIKARANG UTARA, BEKASI JAWA BARAT	250.000.000	220.000.000
PT. PAREBAN JAYA PERKASA	66.976.241.1-417.000	LINK TEGAL TONG NO.12 RT.011 RW.006 KEL.KEBONSARI BANTEN KEC.CITANGKIL, CILEGON	150.000.000	139.290.000
PT. PERINCO GRAHA LESTARI	02.460.209.6-086.000	PERUM TAMAN KEBON JERUK A.III NO.9 MERUYA SELATAN KEMBANGAN JAKARTA BARAT 11660	300.000.000	267.785.740
PT. PRAKTRITR HASTA DARMA	03.007.660.8-015.000	JL. TEBET BARAT DALAM RAYA NO.40 RT.014 RW.003 TEBET BARAT, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12810	200.000.000	208.691.900
PT. PRATAMA CRV	31.395.840.7-403.000	ORANGE GROOVE KOTA WISATA JL.CIANGSANA SF A-6 CIANGSANA GUNUNG PUTRI, BOGOR - JAWA BARAT	75.000.000	47.199.852
PT. PUSAKA GEMILANG TEKNINDO	31.621.814.8-417.000	KOMP. TAMAN WARNASARI INDAH FWA 17D NO.01 RT.001 RW.004 KEL.WARNASARI KEC.CITANGKIL, CILEGON - BANTEN	150.000.000	102.292.850
PT. PUSAKA JAYA INTERNATIONAL	02.321.444.8-413.000	JL. INTI III BLOK C.6 NO.12 LIPPO CIKARANG, SUKARESMI, CIKARANG SELATAN, BEKASI	200.000.000	163.468.525
PT. RED PLANET HOTELS INDONESIA	31.226.153.0-071.000	MENARA BCA GRAND INDONESIA LT 50 JL MT THAMRIN NO.1 MENTENG, JAKARTA PUSAT	50.000.000	27.791.500
PT. REX HARDWARE	03.051.699.1-801.000	JL.SULAWESI NO.328 RT.001 RW.003 BUTUNG-WAJU MAKASSAR - 90173	100.000.000	45.009.801
PT. RONASARANA	01.452.158.7-615.000	JL. RUNGKUT ASRI TENGAH VII NO.33 RUNGKUT KIDUL, RUNGKUT KIDUL RUNGKUT, SURABAYA, JAWA TIMUR	50.000.000	8.899.374
PT. SARIJATI ADHITAMA	01.328.711.5-007.000	JL.DANAU INDAH RAYA BLOK AI/15 RT 006 RW0 11 SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA	50.000.000	1.177.000
PT. SATHIA ANUGRAH BHAKTI	31.640.348.4-606.000	RUKO MEGA GALAXI BLOK 14.C NO.12-A (JL.KERTAJAYA INDAH TIMUR), SURABAYA	50.000.000	8.953.560
PT. SATYA DIAN PRATAMA	02.459.119.0-013.000	JL.MAWAR NO.14 RT.002 RW.014 BINTARO PESANGGRAHAN, JAKARTA SELATAN	100.000.000	65.000.000
PT. SINAR LAUT WIDJAYA	02.756.237.0-722.000	JL.CIPTO MANGUNKUSUMO RT.23 SUNGAI KELEDANG, SAMARINDA SEBERANG - SAMARINDA	75.000.000	16.879.500
PT. SINEGLO RIZBANA MULIA	66.913.995.8-413.000	JL.MELATI 7 TAMAN LEMBAH HIJAU LIPPO CIKARANG NO.18 RT.000 RW.000 KEL.SERANG KEC.CIKARANG SELATAN, BEKASI - JAWA BARAT	100.000.000	76.455.786
PT. SWIRE ALTUS SHIPPING	03.133.636.5-063.000	MENARA ANUGRAH LT.11 KANTOR TAMAN E3 LOT 8.6-8.7 JL.DR.IDE ANAK AGUNG, KAWASAN MEGA KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN	50.000.000	38.367.051
PT. TANKER ARMADA NUSANTARA	01.837.079.1-046.000	JL.PLUIT SELATAN RAYA BLOK C 76-77, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA	75.000.000	54.804.711
PT. THE SECOND CONST ENG THIRD ENG BUREAU	02.957.908.3-048.000	JL.INDUSTRI KAV.B.16 ROYALTON BLOK D NO.18 KEL.GUNUNG SAHARI UTARA - KEC.SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	800.000.000	723.200.003
PT. TRADA TUG AND BARGE	02.752.036.0-062.000	JL.KYAI MAJA NO.4 RT.003 RW.008 GUNUNG KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN	100.000.000	46.798.575
PT. TRIAS WARNA KAWANUA MANDIRI	71.746.195.8-823.000	LINGKUNGAN II NO RT.007 RW.002 KEL.WANGURER BARAT KEC.MADIDIRI KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA	250.000.000	221.749.140
PT. UNITECH FAJAR PRATAMA SAHABAT BARU	02.903.328.9-215.000	KOMPLEK TIBAN IMPIAN BLOK A1 NO.4 RT.001 RW.017 TIBAN BARU SEKUPANG, BATAM	100.000.000	82.214.145
SARIYONO/TET KUI	-	JL. SUTAN SYAHRIR NO.271 (ABCDE) PADANG	100.000.000	34.760.839
SWIBER OFFSHORE CONSTRUCTION PTE LTD	-	JL.KOL.SUGIONO NO.19-20 RT.22 RW.01 (M/KARYA UTAMA) KAPUAS KANAN HULLU - SINTANG	150.000.000	105.623.290
TB. MITRA USAHA	-	12 INTERNATIONAL BUSINESS PARK #01-05 SWIBER @IBP SINGAPORE 609920	100.000.000	84.203.000
TB. HARIAN	-	JL.LINTAS BUNGO-TEBO RT.02/III KEL.TEBING TINGGI KEC.TEBO TENGAH - TEBO	100.000.000	69.674.157
TOKO ANUGRAH PAHALA JAYA	-	JALAN KAPT.PATIMURA NO.140 RT.33 TELANAI PURA JAMBI	100.000.000	47.900.001
TOKO CAT UTOMO	-	JL.SOEKARNO HATTA NO.10 SEMARANG, JAWA TENGAH	100.000.000	68.912.455
TOKO PARIS	-	JL.DIPONEGORO NO.37 KUTOARJO	100.000.000	60.484.001
TOKO SUMBER HARAPAN	07.358.253.8-311.000	JL.PASAR TEBAS NO.27 TEBAS, KALIMANTAN BARAT	100.000.000	96.968.001
TOKO SYAFIRA WARNA MANDIRI	-	JL.S.PARMAN NO.168 BENGKULU	100.000.000	17.172.657
TOKO.SINAR JAYA	07.144.789.0-311.000	JL.LINTAS JAMBI MUARA BANGO KM.5 MUARA TEMBESI KAB.BATANGHARI	100.000.000	56.282.399
UD. MITRA JAYA	07.970.156.1-215.000	JL.LETJEN SUPRAPTO NO.73 TALANG RIMBO-CURUP - BENGKULU	150.000.000	101.320.843
YENNY YAUWRY	14.767.064.0-804.000	KOMP.PUTRA MANDIRI BLOK II NO.72B BUKIT JODOH BATU AMPAR BATAM	50.000.000	20.000.000
		JL.ONTA LAMA NO.91 RT.002 RW.002 MANDALA-MAMAJANG KOTA MAKASSAR	70.000.000	59.805.838
JUMLAH				17.068.248.349

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat pada pembukuan Perusahaan yang telah dibebankan dalam laporan keuangan komersial dan daftar tersebut akan diserahkan ke kantor Pelayanan Pajak PMA I, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPH Badan sebagai lampiran.

Haru Koesmahargyo,
Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
dan Wakil Sekretaris Jenderal Perbanas

Tiga Jurusan Hadapi Fintech

Fintech hadir memenuhi kebutuhan masyarakat. Lebih mudah dan cepat menjadi dua keunggulan yang ditawarkan *fintech*, yang sangat cocok dengan gaya kaum milenial. Bagaimana strategi bank agar bisa berjalan beriringan dengan *fintech*?

Financial technology (*fintech*) hadir mengisi kekosongan, dan industri perbankan mesti segera mengantisipasinya. Demikian kata Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Perbanas, menanggapi maraknya *fintech* belakangan ini. *Fintech* pun digandrungi generasi milenial, yang gaya dan kebutuhannya berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya.

Teknologi dan generasi milenial memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Demikian pula halnya dengan industri perbankan. Era digital dan generasi milenial menjadi tantangan sekaligus peluang yang mesti dihadapi industri ini.

Melihat perkembangan yang makin dinamis, industri perbankan tentu harus segera menyikapinya.

BRI pun membangun strategi demi menghadapi pertumbuhan *fintech*. Lantas, bagaimana bank yang berdiri pada 16 Desember 1895 ini masuk ke pasar milenial? Di sela-sela kesibukannya, Haru Koesmahargyo menjelaskannya kepada *Probank* di salah satu ruangan di lantai 15 Gedung BRI 1, Jakarta.

Petikannya:

Perekonomian global mengalami perlambatan. Bagaimana Anda melihat hal ini?

Memang kita melihat dari luar ada perlambatan ekonomi. Ada perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina (Tiongkok). Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi global, memang ada dampaknya terhadap perbankan nasional. Statistik perbankan nasional menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit pada Oktober 2019 sebesar 8%. Padahal, pada periode-periode sebelumnya pertumbuhan kredit bisa mencapai 10%. Di sisi lain, simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 6%.

Dalam proses perbankan ada sisi *input* dan *output*. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, perbankan bisa tumbuh karena ketersediaan dana (likuiditas) dalam bentuk salah satunya adalah tabungan. Kedua, ada yang namanya *demand*. Nah, saat ini dua hal ini sedang mengalami perlambatan. Likuiditas dapat disalurkan perbankan sesuai dengan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi. *Demand* dari sektor-sektor tertentu ada sedikit perlambatan.

Namun, untuk bank yang fokus ke sektor-sektor tertentu, seperti sektor mikro dan konsumen, masih tetap tumbuh. BRI, misalnya. Kredit mikro di BRI saat ini tumbuh 15%. Sektor-sektor seperti mikro dan konsumen tidak terpengaruh dengan kondisi saat ini. *Demand*-nya masih cukup tinggi. Sektor ini tumbuh sesuai dengan konsumsi masyarakat. Mungkin sektor lainnya, seperti konstruksi, bisa jadi melambat.

Dengan adanya perang dagang Tiongkok dan AS, apa peluang yang bisa diambil perbankan Indonesia?

Indonesia tidak sama dengan negara maju dan negara berkembang lainnya. Ada beberapa potensi yang dimiliki Indonesia. Pertama, potensi jumlah penduduk yang saat ini mencapai sekitar 250 juta. Dari penduduk sebanyak ini, yang belum memiliki rekening bank masih cukup tinggi. Ada sekitar 30 juta sampai dengan 40 juta penduduk. Itu artinya, akses perbankan belum ada. Ini potensi yang besar.

Kedua, potensi mendapatkan kredit. Kalau jumlah penduduk yang belum mengakses bank masih sangat besar, bank sebaiknya bisa lebih turun untuk melakukan penetrasi dan berinklusi. BRI yang fokus ke pasar mikro pertumbuhannya masih tinggi. Pertumbuhan total kredit BRI per Oktober 2019 mencapai 10%. Angka ini di atas pertumbuhan industri perbankan.

Lalu, bagaimana bank memberikan akses kepada masyarakat? Banyak cara bisa dilakukan bank. BRI, misalnya, dengan mendirikan *outlet*. Bahkan, sekarang nasabah bisa mengakses melalui aplikasi, dan ini sangat



membantu. Jadi, dengan teknologi yang makin bisa di-*adopt* masyarakat, akan memudahkan perbankan membuka akses. Sekarang transaksi bisa melalui *mobile*, *automatic teller machine (ATM)*, atau datang ke *outlet* perbankan.

Untuk golongan tertentu, selain memiliki 10.000 kantor, BRI memiliki hampir 400.000 agen BRILink. Agen BRILink biasanya toko. Kalau kantor hanya sampai pukul lima sore, agen BRILink yang berada di toko biasanya buka sampai pukul sembilan malam. Pada Sabtu dan Minggu pun, mereka masih

bisa melayani. Ini potensi besar untuk perbankan di Indonesia. Di sektor lain, seperti konsumen, peluang masih terbuka. Sektor korporasi juga masih besar, seperti kebutuhan pembangunan infrastruktur. Masing-masing bank mempunyai spesialisasi bisnis, dan semua tergantung pada kesiapannya.

Bagaimana bank menyikapi kehadiran *fintech*? Apakah mereka dianggap sebagai pesaing?

Fintech lahir untuk mengisi kekosongan. Sekarang dengan menggunakan aplikasi lebih mendekati pengguna dan penyedia jasa. Untuk layanan jasa keuangan, *fintech* bisa mengumpulkan penyedia dana dan menyalurkannya melalui aplikasi. *Fintech* bisa disebut pesaing dan berpengaruh pada bisnis. Akan tetapi, sebenarnya pasar masih besar. Sekarang masyarakat memiliki opsi, apakah mau mengajukan pinjaman ke *fintech* atau bank. Masing-masing ada plus minusnya. Mengajukan pinjaman melalui *fintech* lebih cepat, mudah, tetapi *size*-nya terbatas. Sedangkan, mengajukan pinjaman melalui bank, prosesnya lebih lama, tapi jumlahnya bisa lebih besar dan bunganya lebih murah.

Menghadapi *Fintech*, sebaiknya bank mengambil beberapa langkah. Pertama, bank bisa seperti *fintech*. Caranya, dengan menyediakan aplikasi sehingga masyarakat mudah mengakses dengan cepat. Mengajukan pinjaman cukup mengisi aplikasi yang tersedia. Tentu saja bunganya harus kompetitif. Upayakan layanan sama cepat dengan *fintech* dengan jumlah lebih besar dan bunga lebih murah.

Bank juga harus menerapkan fleksibilitas waktu pengembalian. Jangka waktu pengembalian bank biasanya satu tahun. Upayakan bisa seperti *fintech*. Saat ini BRI sudah memiliki Pinang (Pinjaman Tenang). Masyarakat yang membutuhkan layanan perbankan, bisa mengakses aplikasi ini.

Kedua, bank bisa merangkul dan bekerja sama dengan *fintech*. Satu keunggulan *fintech* adalah kemampuan mengumpulkan informasi tentang nasabah dengan cepat. Dalam hal ini, bank kalah cepat. Dengan bekerja sama, bank akan melihat calon nasabah yang mengajukan pinjaman ke *fintech*. Berdasarkan data tersebut, bank membuat *score* dan

"*Fintech* bisa disebut pesaing dan berpengaruh pada bisnis. Akan tetapi, sebenarnya pasar masih besar. Sekarang masyarakat memiliki opsi, apakah mau mengajukan pinjaman ke *fintech* atau bank. Masing-masing ada plus minusnya."

memberikan pinjaman kepada yang layak mendapatkan. Dari kerja sama ini, *fintech* mendapatkan *fee* dari bank. Kerja sama seperti ini sangat bagus karena bank dan *fintech* punya keterbatasan dan bisa saling menutupi.

Ketiga, membeli *fintech*. Kalau perlu, bank masuk ke *fintech* dengan memberikan modal. Alhasil, bank memiliki *fintech*. Tiga hal tadi adalah opsi bank menghadapi *fintech*. *Fintech* hadir mengisi kekosongan, dan bank harus cepat mengantisipasinya. Yang paling penting, masyarakat tetap terlindungi kepentingannya dan tidak dirugikan.

Indonesia mendapat bonus demografi dengan banyaknya generasi milenial yang akan memasuki usia produktif. Bagaimana BRI meng-handle sumber daya manusia (SDM) dan nasabah milenial?

Saat ini 80% karyawan BRI adalah generasi milenial. Mereka mempunyai modal yang cukup dari sisi latar belakang pendidikan, dan akses terhadap informasi juga lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal ini benar-benar kami manfaatkan dan kami *maintain talent* mereka. Pada 2020 kami akan menjadikan BRI sebagai 'Home for The Best Talent'. Kami berusaha menciptakan 'Work Life Balance' di BRI. Bagi kaum milenial, kami menjadikan BRI tempat berkarya, menampung aspirasi, dan membuka jenjang karier. Saat ini ada satu Direktur BRI dari generasi milenial. Ini menunjukkan kompetisi yang terbuka di BRI.

Dari sisi *life*, BRI menampung dan memfasilitasi aspirasi kaum milenial. Yang mempunyai kegemaran lari, bernyanyi, dan olahraga, kami fasilitasi dengan membuatkan *community*. Organisasi juga disederhanakan sehingga interaksi antar-*peer*, atasan langsung dan tidak langsung, serta bawahan menjadi lebih terbuka. Jadi, mereka tidak dikungkung dalam organisasi yang kaku. Karyawan milenial didorong untuk menyumbangkan ide-ide. Mereka sering memberi masukan yang didapat dari luar. Toh *customer proposition* sebagian dari mereka karena mereka juga pengguna produk BRI. Kalau ingin *customer number one*, layani dulu *employee*.

Bagaimana Anda melihat peran Perbanas di industri perbankan?

Perbanas merupakan asosiasi yang sangat diperlukan. Bank masih dibutuhkan di negeri ini karena ketergantungan pembiayaan dari bank masih tinggi. Yang menjadi poin penting, bank harus sehat dan tumbuh *sustainable*. Bank harus optimal dalam beroperasi, jangan sampai jatuh dan bermasalah. Jika hal ini terjadi, *public trust* akan terganggu. Oleh karena itu, Perbanas partner penting buat pemerintah dan regulator serta sisi lain partner sektor riil. Pada saat regulator membuat aturan, harus dilihat kebutuhan sektor riil. Peraturan regulator untuk industri perbankan pun harus bisa mendorong industri ini. ■

"Bekerja di bank merupakan *long term career*. Oleh karena itu, semua orang yang memutuskan berkarier di industri perbankan harus mempunyai komitmen untuk mengembangkan diri."

Long Term Career

Ketekunan Haru Koesmahargyo membangun karier di industri perbankan mengantarkannya ke kursi Direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 2015. Banyak mendengar sebelum mengambil keputusan menjadi filosofi Haru dalam berkarya. Apa yang kini diraih penyandang gelar strata satu (S-1) Teknik Industri Pertanian dari Universitas Brawijaya, Malang, ini juga buah dari keyakinannya bahwa bekerja harus dengan niat baik dan upaya maksimal. Haru yakin, dengan terus berniat baik dan berupaya, suatu saat pasti akan membuahkan hasil. "Kalau belum hari ini, pasti di kemudian hari," tandasnya.

Haru menilai, industri perbankan adalah industri yang unik. Satu hal yang menurutnya unik adalah yang mengatur industri ini cukup banyak. Berbeda halnya dengan sektor riil. Produk mobil, misalnya, produknya aman bila ada *seat belt*-nya. Tanpa melihat pabriknya. Di perbankan, selain produk, orang-orang yang ada di dalamnya juga diatur. "Ini menyangkut *trust* karena ada uang masyarakat di bank," ujar peraih gelar *master of business*

administration (M.B.A.) bidang *investment banking* dari Emory University, Amerika Serikat (AS), ini.

Bagi Haru, bekerja di bank merupakan *long term career*. Oleh karena itu, semua orang yang memutuskan berkarier di industri perbankan harus mempunyai komitmen untuk

mengembangkan diri. Banyak disiplin ilmu yang dibutuhkan di industri perbankan. Yang lebih penting lagi, setiap orang yang bekerja di perbankan harus benar-benar memahami lingkungan usaha. Mereka juga harus memahami regulasi yang menyangkut kegiatan perbankan. Dalam berbisnis, pelaku bisnis perbankan memang harus *comply* pada regulasinya.



Stimulus untuk Gairahkan Perekonomian

Melambatnya perekonomian global berdampak pada perekonomian domestik. Perbanas menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk sektor perbankan dan para pelaku usaha. Apa saja rekomendasinya?

Dampak perlambatan ekonomi global mulai terasa pada ekonomi domestik, seperti terlihat di industri perbankan. Perbankan kini kesulitan menyalurkan kredit dan mencari dana pihak ketiga (DPK). Pertumbuhan kredit dan DPK seret. Seretnya pertumbuhan kredit dan DPK ini otomatis berpengaruh pada *loan to deposit ratio* (LDR), yang menjadi ketat. Per September 2019 LDR industri perbankan telah menyentuh angka 94%-95%.

Perbanas meramalkan bahwa angka inflasi akan meningkat pada 2020. Hal itu dipicu oleh kenaikan cukai rokok, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan tarif tol. Data-data ini makin memperkuat potensi lesunya perekonomian Indonesia pada 2020.

Karena itu, stimulus-stimulus perekonomian diperlukan untuk mendorong gairah perekonomian nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Perbanas, Himpunan Bank Negara (Himbara), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (Perbina), dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada minggu keempat November 2019, Wakil Ketua Umum Perbanas, Tigor M. Siahaan, menyampaikan stimulus-stimulus yang dirasa perlu dilakukan bagi perbankan dan pelaku usaha.

Di sisi perbankan, Perbanas merekomendasikan penyesuaian penyaluran porsi kredit sesuai dengan kemampuan tiap-tiap

bank. Tujuannya agar setiap bank mampu menjaga risiko dan kredit macet. Menurut aturan yang berlaku, 20% portofolio setiap bank harus dialokasikan untuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Perbanas berpendapat, angka 20% terlalu kecil untuk bank yang fokus di UKM, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI). Namun, angka ini akan berpotensi menjadi kredit macet apabila dipaksakan pada bank yang minim pengalaman UKM sehingga perlu ada penyesuaian porsi.

Perbanas mengapresiasi keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan giro wajib minimum (GWM) yang sudah memberi sedikit stimulus bagi likuiditas perbankan. Menurut Tigor, penurunan GWM oleh BI telah memberi sedikit stimulus sebesar Rp20 triliun hingga Rp30 triliun untuk likuiditas industri perbankan.

Reformasi regulasi menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi pemerintah dan harus segera dirampungkan. Perbanas menilai, potensi besar ekonomi Indonesia dapat dimanfaatkan melalui simplifikasi perizinan. Saat ini kebijakan-kebijakan yang perlu dipercepat antara lain kemudahan perizinan bagi swasta, kejelasan regulasi teknologi perbankan, serta peninjauan kembali undang-undang (UU) *spin off* unit usaha syariah (UUS).

Tigor mengemukakan, sinergi antara perbankan dan *fintech* perlu diutamakan untuk memaksimalkan potensi pasar domestik Indonesia. Menurutnya, ke depan, *fintech* dapat menjadi solusi untuk mempercepat inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Meskipun begitu, pelaku industri keuangan, dalam hal ini perbankan, perlu dukungan regulasi pemerintah terhadap digitalisasi teknologi perbankan serta sinergi antara *fintech* dan perbankan. Perlu ada *roadmap* dan regulasi yang jelas.

Untuk perbankan syariah, Perbanas menilai UU wajib *spin off* UUS pada 2030 tidak efisien bagi perbankan nasional yang sedang fokus pada konsolidasi. Perbanas mengungkapkan bahwa beberapa UUS telah mencatatkan kinerja yang baik. *Spin off* UUS hanya akan membebani kinerja dan memperlambat konsolidasi. Maka dari itu, Perbanas menyarankan peninjauan kembali UU tersebut. "Tidak perlu buka-buka bank baru lagi. Kita inginnya konsolidasi perbankan secara menyeluruh," tegas Tigor. ■



Rapat Dengar Pendapat di DPR RI; perlu stimulus

Ekonomi Dunia Masih Melambat

Perlambatan ekonomi global masih akan dirasakan dalam beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun diperkirakan berada di posisi 5,1%-5,3% pada 2020. Pemerintahan baru dihadapkan pada tantangan pembenahan regulasi dan pengembangan SDM.

Indonesia ditargetkan masuk dalam lima besar ekonomi dunia pada 2045 dengan angka kemiskinan mendekati nol persen. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pertamanya setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024, pada 20 Oktober 2019. Untuk mencapai visi “Indonesia Emas 2045” itu, tentu dibutuhkan kerja keras seluruh elemen bangsa.

Impian memang harus digantungkan setinggi langit. Namun, dalam beberapa tahun ke depan perekonomian dunia diperkirakan masih dilanda ketidakpastian. Indonesia pun bakal terkena imbasnya. Menurut Ryan Kiryanto, Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI), pertumbuhan ekonomi global diprediksi melambat hingga 2020. Beberapa negara pun mulai mengalami resesi, dan Indonesia berpotensi terjebak dalam situasi yang sama.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia terutama dipengaruhi oleh penurunan volume perdagangan akibat ketegangan hubungan dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Situasi ini juga menyebabkan berkurangnya kegiatan produksi di banyak negara. Melihat kondisi tersebut, Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada di kisaran 5,0%-5,1% dan meningkat menjadi 5,1%-5,3% pada 2020. Inflasi pun diperkirakan berada di bawah 3,5%, yakni di kisaran 3,2% atau 3,3%.

Menanggapi kondisi perekonomian dunia saat ini, Perry Warjiyo, Gubernur BI, menyatakan bahwa pertumbuhan Indonesia secara relatif termasuk “sejuk” jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh sinergi yang kuat antara BI dan pemerintah. “Meskipun dibandingkan, *we are not that bad*. Apalagi dengan negara lain, seperti Singapura, India, Cina (Tiongkok),” ujarnya.



SDM milenial; bonus demografi

Pemerintahan Baru

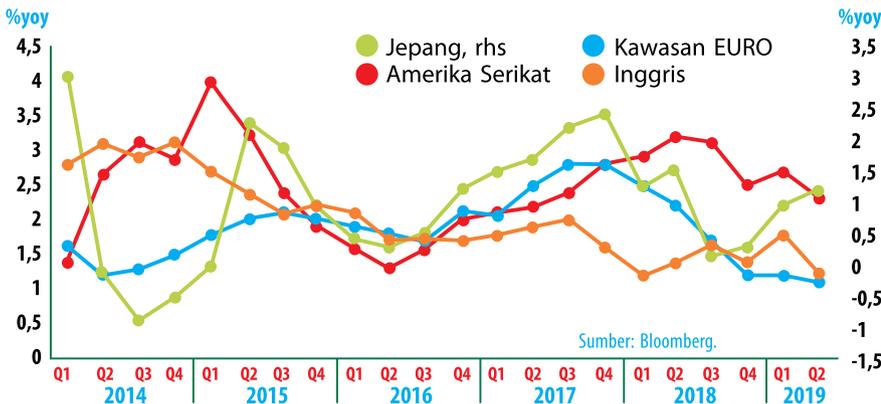
Pemerintahan Jokowi periode kedua dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang resmi diumumkannya pada 23 Oktober 2019, mendapat respons positif dari pelaku pasar. Rupiah pun sempat menguat setelah pengumuman itu.

Menanggapi pemerintahan Jokowi periode kedua, ekonom PT Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro, mengatakan bahwa pemerintahan pada periode ini perlu lebih fokus pada *soft infrastructure*, seperti reformasi regulasi dan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM). Upaya perbaikan regulasi dan peningkatan mutu SDM dinilai dapat menarik para *fresh investor* untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Satria, ketika investor memutuskan untuk berinvestasi, mereka tentu ingin mengetahui beberapa hal. Pertama, tentang konsistensi legalitas atau hukum. Kedua, soal tenaga kerja. Saat akan membuka pabrik di Indonesia, investor tentu harus tahu, apakah ada pekerja atau *engineer*-nya. “Saya rasa, dari sisi *soft infrastructure*-nya masih harus ditingkatkan lagi,” tambahnya.

Kasus relokasi 33 perusahaan dari Tiongkok selama Juni-Agustus 2019 akibat perang dagang AS dan Tiongkok harus

Pertumbuhan PDB Negara Maju



menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Dari ke-33 perusahaan tersebut, tak ada satu pun yang singgah di Indonesia. Sebanyak 23 perusahaan memilih pindah ke Vietnam dan 10 lainnya ke Kamboja, Thailand, serta Malaysia.

Terkait dengan hal itu, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Sri Adiningsih, menilai, saat itu para investor asing tengah menunggu perkembangan suasana politik dan sosial yang hangat karena pemilihan presiden (pilpres). Kepastian hukum dari presiden terpilih dinilai berpengaruh pada keputusan investor. Setidaknya, setelah pilpres usai, arah perekonomian Indonesia lima tahun ke depan menjadi jelas. Terkait dengan peluang investasi Indonesia lima tahun ke depan, ia pun mengaku tetap optimistis.

Sri Adiningsih mengakui bahwa Indonesia masih lemah dalam hal penerapan hukum. Padahal, lemahnya kepastian hukum dan sulitnya regulasi tentu berpengaruh pada bisnis. Karena itu, Indonesia kini tengah membenahi regulasi lewat rencana penerapan Omnibus Law dan implementasi Online Single Submission (OSS).

Jika regulasi sedang dibenahi, bagaimana dengan pengembangan SDM? Ekonom Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro, menilai, hal-hal paling mendasar yang harus diperbaiki dari sisi SDM Indonesia adalah *mindset*,

Pertumbuhan PDB Negara Emerging



penguasaan data, dan *supply chain*. Karena itu, diperlukan pelatihan yang terfokus pada produksi bagi para dosen dan mahasiswa vokasi.

SDM Indonesia juga perlu memahami data dan memiliki *database* mikro agar semua data produksi tercatat dengan jelas dan terperinci. Selain itu, SDM Indonesia mesti lebih produktif dengan mengolah bahan-bahan mentah menjadi barang yang lebih bernilai jual tinggi sehingga tidak terus-terusan menjual barang mentah saja.

“Indonesia harus berhenti main aman dan main gampang. Kita maunya jual mentah saja. Padahal, tuntutan dari Eropa itu agar barang mentah kita bisa bergerak

ke industri-industri yang lebih bernilai,” ujar Ari.

Dalam meningkatkan mutu SDM, besarnya jumlah angkatan kerja milenial menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perlakuan berbeda. Hermanto Siregar, ekonom yang juga Rektor Perbanas Institute, mengatakan, agar para milenial dapat bersaing di pasar global, institusi akademik harus membekali anak didiknya dengan *skill* ekstra. Selain itu, besarnya potensi tenaga kerja milenial mesti dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai sehingga *supply* dan *demand* terpenuhi dan tak terjadi *oversupply* tenaga kerja.

“Bonus demografi milenial ini harus kita sikapi dengan hati-hati. Memang, secara potensi, banyak usia muda yang siap masuk pasar tenaga kerja. Tapi, ini baru sekadar potensi. Kalau sekiranya kita tidak mempunyai investasi yang cukup untuk menyediakan kesempatan kerja, bisa-bisa mereka menganggur,” ujar Hermanto.

Dengan hadirnya mayoritas angkatan kerja milenial, hadir pula potensi penyaluran kredit baru. Peluang penyaluran kredit muncul dari hal-hal yang terkait dengan gaya hidup milenial, seperti kuliner, *travelling*, *gadget*, dan teknologi. Hingga pertengahan 2019, kinerja pertumbuhan kredit tercatat masih bagus, yakni di kisaran 9,94%. Biro Riset Infobank (birI) memprediksi pertumbuhan kredit berada di kisaran 8%-10% hingga akhir 2019. Sementara, pada 2020 pertumbuhan kredit diproyeksikan lebih kecil, yakni di kisaran 7%-9%.

Indonesia memang masih memiliki pasar domestik yang besar. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertengger di kisaran 5% pun masih bisa dibilang aman. Namun, pemerintah dan dunia usaha nasional tak boleh lengah dan harus tetap waspada. Seperti kata Ryan Kiryanto, “Jangan keasyikan main pasir di pinggir pantai, sementara ancaman tsunami sudah mendekati garis pantai.” Intinya, perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lain sehingga tak hanya bertumpu pada pasar domestik. ■

Mengintip Pasar Milenial dan Sektor Informal

Perlambatan ekonomi global masih akan dirasakan dalam beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun diperkirakan berada di posisi 5,1%-5,3% pada 2020. Pemerintahan baru dihadapkan pada tantangan pembenahan regulasi dan pengembangan SDM.

Hanya ada dua kunci agar bisnis *mortgage* berhasil dan tumbuh, yakni sinergi kolaborasi dan kreativitas. Hal ini ditekankan Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja 2014-2019, saat menyampaikan *keynote speech*-nya dalam “Indonesia Mortgage Forum 2019” di Jakarta, 17 Oktober 2019. Mardiasmo mengingatkan pentingnya sinergi kolaborasi di antara para *stakeholders* sektor properti. Hal lain yang menurutnya juga tak boleh dilupakan adalah kreativitas dalam bentuk inovasi.

Mardiasmo mengatakan, kolaborasi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan industri perbankan diperlukan. Mereka perlu berkomunikasi terkait dengan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan sektor properti sehingga dapat dinikmati masyarakat. Kolaborasi antarlembaga keuangan juga penting guna menumbuhkan bisnis perumahan.

Sebagai catatan, berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah milenial akan mencapai 90 juta jiwa pada 2020. Para milenial yang masuk usia produktif akan menjadi tulang punggung ekonomi sekaligus menjadi target utama pasar properti Indonesia. Sedangkan, menurut survei yang dilakukan IDN Research Institute dalam “Indonesia Millennial Report 2019”, baru 35,1% milenial yang memiliki rumah sendiri. Artinya, ada sekitar 65% potensi pasar yang bisa digarap.

Menggarap pasar milenial membutuhkan inovasi. Kebutuhan mereka akan rumah berbeda dengan generasi sebelumnya. Dalam hal ini, pengembang dituntut untuk kreatif dalam menciptakan hunian bagi generasi milenial. Dari sisi pembiayaannya pun dibutuhkan kreativitas, mengingat generasi milenial lebih lekat dengan kepraktisan dan kecepatan. Kebutuhan ini bisa diakomodasi dengan melibatkan *financial technology (fintech)* yang mudah diakses.

Terkait dengan kebutuhan rumah, *Founder and Chief Executive Officer (CEO)* Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, mengungkapkan bahwa keinginan generasi milenial untuk memiliki rumah masih sangat tinggi. “Karena, mayoritas milenial mengatakan bahwa prioritas hidup yang ingin dicapai adalah membahagiakan orang tua dan memiliki rumah,” jelasnya.

Berdasarkan laporan “Indonesia Millennial Report 2019” dari IDN Research Institute, dari 1.400 orang generasi



Pameran properti; kolaborasi dan kreativitas

milenial yang menjadi responden dalam riset tersebut, 54,2%-nya memiliki prioritas untuk punya rumah.

Selain pasar milenial, sektor lain yang juga memiliki potensi besar untuk menjadi pasar properti adalah para pekerja sektor informal. Menurut BPS, tenaga kerja informal adalah mereka yang pada umumnya bekerja di perusahaan tanpa badan hukum dan hanya berdasarkan perjanjian yang tidak tercatat. Sayangnya, pasar ini belum digarap dengan serius. Data BPS menyebutkan, pada Februari 2019 sebanyak 57,27% dari total tenaga kerja Indonesia adalah tenaga kerja informal.

Pemerintah diharapkan bisa memaksimalkan potensi pembiayaan *mortgage* di sektor informal tersebut. Hal itu diungkapkan Aviliani, pengamat ekonomi yang juga Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas. “Makin ke desa makin banyak sektor informalnya. Di DKI memang sektor formal lebih banyak, tapi makin ke desa sektor informalnya makin tinggi, formalnya makin kecil,” ucapnya.

Aviliani juga menyatakan, potensi sektor informal dalam pembiayaan perumahan sangat besar jika aturan regulator bisa diperlonggar lagi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini BI dan OJK, harus mengoptimalkan potensi tersebut melalui berbagai kebijakannya.

Perkembangan Kredit Properti

Dalam lima tahun terakhir kinerja sektor properti mengalami perlambatan. Menurut survei BI, pada triwulan III 2019 Indeks Permintaan Properti Komersial tumbuh 0,17% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*quarter to quarter/ qtq*). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya yang hanya tumbuh 0,13% (*qtr*). Sedangkan secara tahunan, terpantau ada perlambatan pertumbuhan Indeks Permintaan Properti Komersial dari 1,19% (*year on year/yoy*) menjadi 0,89% (*yoy*) pada triwulan III 2019.

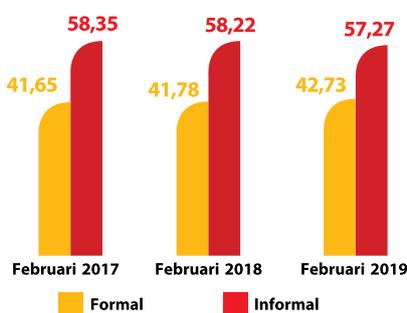
Agar sektor properti tetap tumbuh di tengah kondisi perekonomian yang melambat, regulator telah menyusun kebijakan-kebijakan yang memudahkan pembelian properti, mulai dari insentif pajak hingga relaksasi *loan to value (LTV)* dan *financing to value (FTV)*. Dari sisi perpajakan, pemerintah hanya memungut pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 20% atas rumah mewah, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga di atas Rp30 miliar.

Pemerintah juga melakukan pelonggaran pajak penghasilan (PPh). Tarif PPh Pasal 22 atas properti yang tergolong barang mewah diturunkan menjadi 15%. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2019 yang berlaku sejak 11 Juni 2019.

BI pun sudah beberapa kali merevisi aturan *LTV/FTV* sejak digulirkan pada 2012. Pada 2019 BI kembali merelaksasi ketentuan *LTV/FTV* dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/13/PBI/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Dalam aturan *LTV* terbaru, uang muka untuk kredit pemilikan rumah (KPR) kedua rumah tapak tipe 21-70 diturunkan dari 15% menjadi 5% hingga 10%, sedangkan rumah tapak tipe di atas 70 turun dari 85% menjadi 80%. Untuk KPR rumah susun atau apartemen, uang muka

Perkembangan Tenaga Kerja di Indonesia (dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

diturunkan dari 15% menjadi 10% untuk tipe di bawah 21 dan tipe 21-70. Sementara, untuk rumah susun atau apartemen tipe di atas 70, uang muka diturunkan dari 20% menjadi 15%. Aturan baru *LTV* ini diterapkan per 2 Desember 2019.

Berdasarkan data OJK, kredit yang disalurkan bank umum ke sektor properti dalam tiga tahun terakhir masih fluktuatif. Pada 2017 pertumbuhan kredit properti sempat melambat dari 13,15% pada 2016 menjadi 11,92% pada 2017 secara *yoy*. Namun, pertumbuhannya kembali melejit hingga 15,13% pada 2018 (*yoy*).

Hingga Agustus 2019, penyaluran kredit properti bank umum mencapai Rp1.139,36 triliun. Angka ini tumbuh 14,79% dibandingkan dengan Agustus 2018. Jumlah tersebut menyumbang 21,51% dari total kredit bank umum yang sebesar Rp5.452,88 triliun. Secara kualitas, kredit properti bank umum juga masih dalam batas aman, terlihat dari *non performing loan (NPL)*-nya yang hanya 2,93%.

Kredit properti masih ditopang KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan pangsa mencapai 45,42% atau sebesar Rp517,54 triliun. Penyaluran KPR dan KPA pada Agustus 2019 tumbuh 11,41% dibandingkan dengan Agustus 2018 yang tercatat Rp468,57 miliar.

Sementara, kredit konstruksi mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni 25,64% menjadi Rp360,76 triliun pada Agustus 2019 (*yoy*). Kredit real estate juga tumbuh 10,23% menjadi Rp261,06 triliun. Kedua sektor tersebut masing-masing menyumbang 31,55% dan 22,91% terhadap penyaluran kredit properti. Melihat data-data tersebut serta jumlah generasi milenial dan pekerja sektor informal, pasar *mortgage* ke depan masih menjanjikan. ■

Asuransi Kredit untuk Sektor Informal

“Indonesia Mortgage Forum 2019” menghasilkan sembilan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan sektor properti. Pasar milenial dan sektor informal menjadi bahasan dalam forum yang dihadiri pelaku bisnis perbankan, developer, *multifinance*, asuransi, *fintech*, dan regulator ini.

Salah satu rekomendasi yang dirumuskan adalah penggunaan pola asuransi kredit untuk sektor informal. Konsep ini perlu dipertimbangkan.

Menurut Aviliani, pengamat ekonomi yang juga Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, pada Februari 2019 sebanyak 29,46% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian, 18,92% di sektor perdagangan, dan 14,09% di industri pengolahan. Pekerja di sektor pertanian dan perdagangan masuk dalam kategori pekerja sektor informal dengan penghasilan yang tidak rutin. Pekerja di sektor pertanian mendapatkan penghasilan saat panen, yakni tiga atau enam bulan sekali.

Hingga sekarang, belum ada regulasi yang bisa mengantisipasi masalah yang



dihadapi para pekerja sektor informal. Dengan penghasilan tidak tetap, mereka dituntut untuk kreatif agar dapat memiliki rumah. “Kalau mengikuti aturan, terlambat membayar cicilan langsung masuk kol (kolektibilitas kredit),” ujar Aviliani.

Terkait dengan kemungkinan keterlambatan pembayaran cicilan rumah untuk pekerja informal, asuransi kredit sebenarnya bisa dijadikan solusi. Langkah awalnya memang perlu dilakukan pemetaan karakteristik pekerja di masing-masing sektor ekonomi.

Mencari Solusi Mortgage

Generasi milenial dan sektor informal adalah dua kelompok yang menjadi pasar potensial properti saat ini. Untuk menyasar mereka perlu beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dua kelompok ini.

Sektor perumahan atau *mortgage* masih menyisakan sejumlah masalah yang harus diselesaikan para pemangku kepentingan di sektor ini. Sebut saja sulitnya bagi kaum milenial dan kalangan pekerja sektor informal untuk mendapatkan pembiayaan perumahan.

Generasi milenial yang sekarang ini masuk dalam usia produktif perlu mendapat perhatian tersendiri dari para pemain atau pelaku di sektor ini. Pun dengan para pekerja sektor informal. Bahkan, ketika merujuk preferensi para milenial yang lebih memilih bekerja paruh waktu, diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan persentase pekerja sektor informal akan meningkat. Hal itu tentu bisa menjadi pasar yang potensial.

Fenomena yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumah sepertinya sudah bergeser. Farid Rahman, Wakil Ketua Umum Perbanas, saat membuka “3rd Indonesia Banking Mortgage 2019” di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 17 Oktober 2019, mengatakan, “Kalau dulu orang lebih senang membeli rumah, sekarang orang lebih senang menyewa rumah.” Dengan adanya perubahan ini, pelaku industri harus mengubah cara pemasaran atau komunikasi dalam menawarkan produk perumahan.

Forum “3rd Indonesia Banking Mortgage 2019” yang mengangkat tema “Pembiayaan Mortgage Jenuh? – Prospek Pasar Milenial, Sektor Informal dan Kolaborasi dengan Fintech” menjadi agenda pertemuan para pemangku kepentingan di bidang *mortgage*. Menurut Suryanti Agustinar, Ketua Indonesia Mortgage Bankers Association (IMBA) yang juga *Executive Vice President Non-Subsidized and Consumer Lending Division* Bank Tabungan Negara (BTN), pasar milenial adalah pasar dari kalangan usia 21-35 tahun. “Kelompok usia ini adalah *end user* yang membutuhkan rumah sebagai rumah pertama mereka sehingga potensinya sangat besar untuk digarap perbankan,” ujar Suryanti.

Pasar dari sektor informal juga sangat potensial. Hanya saja, mereka selama ini dinilai belum *bankable* sehingga sulit untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR). Padahal, secara finansial, mereka sangat *feasible*. “Ini masalah klasik yang harus kita diskusikan bersama dengan seluruh *stakeholders* industri keuangan, khususnya regulator,” ujarnya.



“3rd Indonesia Mortgage Forum 2019”; pasar milenial dan sektor informal

Forum “3rd Indonesia Banking Mortgage 2019” menghasilkan sembilan rekomendasi yang disampaikan kepada *stakeholders mortgage*. Forum ini menekankan bahwa pasar *mortgage* tidak jenuh. Potensinya masih besar, sebut saja pembiayaan perumahan untuk kelompok milenial dan pekerja informal.

Sembilan rekomendasi yang disampaikan kepada *stakeholders* yaitu (1) diperlukan relaksasi skema KPR untuk sektor informal; (2) dibutuhkan kolaborasi dengan *financial technology (fintech)*; (3) pola asuransi untuk sektor informal; (4) perlu edukasi untuk kaum milenial melalui media digital; (5) kerja sama antara bank dan *fintech* dalam hal pembayaran *down payment (DP)* oleh *fintech* dan selanjutnya oleh perbankan; (6) produk KPR untuk kaum milenial; (7) standardisasi perizinan pengembangan proyek properti di instansi terkait; (8) semua developer harus terdaftar dalam sistem registrasi pengembang (SIRENG); dan (9) meningkatkan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhadap asosiasi untuk meningkatkan kapabilitas anggota asosiasi dan menghindari kesalahan informasi dalam beriklan. ■

IBEX 2019: Tidak Hanya untuk Sektor Perbankan

“Indonesia Banking Expo (IBEX) 2019” yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta, beberapa waktu lalu, menjadi momen yang paling strategis. Pasalnya, agenda tahunan ini digelar beberapa minggu setelah pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Hal itu diungkapkan Andry Asmoro, Wakil Ketua Organizing Committee IBEX 2019, mengawali *press conference* yang diselenggarakan di Mandiri Club, Jakarta, pada 4 November 2019.



Concern pemerintah pada perkembangan industri keuangan di Tanah Air makin nyata dengan hadirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka perhelatan yang digagas Perbanas ini. IBEX 2019 diisi dengan forum-forum diskusi yang dihadiri oleh *top player financial services* dari dalam dan luar negeri. Seperti tahun-tahun sebelumnya, salah satu bank—biasanya bank besar—menjadi *host* penyelenggaraan IBEX. “Tahun ini *host*-nya adalah Bank Mandiri,” jelas Farid Rahman, Wakil Ketua Umum Perbanas, saat *press conference*.

Hadir memberikan *keynote speech* saat pembukaan IBEX 2019 adalah Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Sugeng, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). *Welcome speech* disampaikan Tigor M. Siahaan, Wakil Ketua Umum Perbanas.

Menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di industri keuangan, IBEX 2019 mengangkat tema “*Consolidate to Elevate*”. Tema ini berbeda dengan IBEX tahun-tahun sebelumnya yang hanya merevisi capaian industri perbankan. Menurut Ahmad Siddik Badruddin, Ketua Steering Committee IBEX 2019, tema “*Consolidate to Elevate*” mengandung makna bagaimana industri jasa keuangan berperan mendorong

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diharapkan tema ini *in line* dengan program-program pemerintah. Dari IBEX 2019 diharapkan akan diperoleh gambaran bagaimana industri jasa keuangan akan berkonsolidasi. Jadi, IBEX 2019 tidak hanya berorientasi pada industri perbankan.

Dalam *event* ini Perbanas menyerahkan pokok pemikiran tentang Layanan Jasa Keuangan Nusantara kepada Presiden Jokowi. Pokok pemikiran ini berisi beberapa konsep, di antaranya bagaimana industri jasa keuangan menghadapi berbagai perubahan saat ini dan bagaimana pula langkah ke depannya; bagaimana konsolidasi dan kerja sama antarpemain di industri jasa keuangan serta bagaimana mereka membangun ekosistem yang kuat, efektif, dan efisien. Inisiatif industri perbankan menyusun pokok pemikiran sebagai hasil dari gelaran IBEX 2019 ini mendapat respons positif dari BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan *stakeholders* perbankan. ■



Kerja Sama Perbanas Jabar dengan Perguruan Tinggi

Perbanas Jabar berkolaborasi dengan enam perguruan tinggi di Bandung. Kerja sama ini diharapkan lebih menajamkan peran industri perbankan dan institusi perguruan tinggi dalam pembangunan ekonomi.

Sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan pemerintah pusat, Perbanas Jabar turut mendukung pengembangan sektor pariwisata dan menguatkan sumber daya manusia (SDM). Dukungan Perbanas Jabar terhadap dua hal tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan kerja sama dengan enam perguruan tinggi di Bandung.

Potensi pariwisata Jabar yang cukup besar, tapi belum tergarap secara optimal, seperti diungkapkan Hendry Bunardi, Ketua Perbanas Jabar,

melatarbelakangi kerja sama itu. Perbanas Jabar menyadari bahwa untuk mengembangkan sektor pariwisata, faktor SDM tidak bisa dikesampingkan. Nah, guna menjembatani sektor pariwisata dan ketersediaan SDM, Perbanas Jabar berkolaborasi dengan keenam perguruan tinggi tersebut sebagai institusi yang menyediakan SDM.

Penandatanganan kerja sama dilaksanakan pada 21 Oktober 2019. Perwakilan yang hadir dalam acara penandatanganan ini adalah Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Institut Teknologi Bandung (ITB); Dr. Keri Lestari, S.si, M.Si, Apt, Wakil Rektor III Universitas Padjadjaran (Unpad); Robby Yussac Tallar, S.T., M.T Dipl. IWRM, Ph.D., Wakil Rektor III Universitas Maranatha; Mangadar Situmorang, Ph.D, Rektor Universitas Parahyangan (Unpar); Oliver Hasan Padmanegara, S.E., M.Sc., Kepala Biro Kerja Sama Universitas Widyatama (Utama); dan Roland Y.H. Silitonga, M.T., Direktur Akademik Institut Teknologi Harapan Bangsa (ITHB).

Dalam kerja sama itu, Perbanas Jabar sebagai asosiasi industri perbankan berkomitmen untuk menyediakan tempat magang bagi mahasiswa keenam perguruan tinggi tersebut. Perbanas Jabar juga menyediakan tenaga pengajar dengan latar belakang profesional perbankan dalam kuliah umum dengan materi seputar *financial technology (fintech)*, ekonomi makro dan perbankan, komunikasi, serta hukum perbankan dan memberikan *soft skill* untuk membekali mahasiswa.



Selain itu, Perbanas Jabar memberikan informasi tentang peluang kerja di sektor perbankan dan memberikan dukungan *entrepreneurship* dalam kegiatan *start up* yang dikelola oleh mahasiswa. Perbanas Jabar juga menyediakan dukungan bila perguruan tinggi tersebut membutuhkan penguji eksternal dalam sidang akhir mahasiswa.

Sebagai lembaga pendidikan, keenam perguruan tinggi tersebut menyediakan program akademik lanjutan (strata 2 dan strata 3) untuk karyawan bank anggota Perbanas Jabar. Tersedia juga program sertifikasi profesi sesuai

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Untuk mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, dalam kerja sama ini keenam perguruan tinggi tersebut dapat menyediakan data-data riset yang dibutuhkan Perbanas Jabar. Kerja sama dalam bentuk pemberian beasiswa untuk mahasiswa juga menjadi kesepakatan bersama.

Kolaborasi tersebut menjadi komitmen Perbanas Jabar dalam mendorong perekonomian daerah. “Perbankan memberikan dukungan melalui pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelaku usaha, sedangkan akademisi mendukung dengan keilmuan,” ujar Hendry.

Salah satu program yang merupakan kolaborasi Perbanas Jabar dengan perguruan tinggi adalah Program Desa Asuh di Kampung Kahuripan, Desa Nagrog, Cicalengka, Kabupaten Bandung. Program yang diresmikan pada 4 Agustus 2018 itu merupakan kerja sama Perbanas Jabar dengan Universitas Widyatama. Dalam program ini warga dilatih untuk beternak lele, bahkan sudah melakukan panen perdana pada awal Oktober 2018.

Kalangan perguruan tinggi memandang positif kolaborasi antarindustri perbankan dengan perguruan tinggi. Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono berharap, kerja sama ini dapat mengoptimalkan kelebihan masing-masing dalam upaya mendukung pembangunan. ■

Ibadah Sambut 2020

Sebagai rasa syukur atas capaian kinerja industri perbankan Provinsi Jawa Barat (Jabar) selama 2019, Perbanas Jabar menyelenggarakan kegiatan kerohanian pada 6 Desember 2019. Kegiatan yang dilakukan di Masjid Agung Trans Studio Bandung ini diisi dengan kajian bertema “Meningkatkan Keimanan di Lingkungan Kerja, Keluarga, dan Masyarakat”. Pembicara dalam kajian tersebut adalah Dr. K.H. Suherman Ediansyah M.Ag. Bagi umat kristiani, kegiatan kerohanian digelar di Gereja Katedral Bandung dalam bentuk Misa Jumat Pertama.

Selain wujud rasa syukur, kegiatan kerohanian yang melibatkan pemimpin dan staf perbankan di Kota Bandung dan sekitarnya ini dilakukan dalam rangka menyambut 2020. Harapannya, insan perbankan di lingkungan Perbanas Jabar selalu mendapatkan berkat pada 2020.

Kegiatan kerohanian tersebut dibuka Bambang Sukardi, Kepala Bagian Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Pemerintah Kota Bandung. Hadir pula Doni P. Joewono, Kepala Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jabar dan Sabarrudin yang mewakili Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Jabar. Kegiatan ini diharapkan menjadi agenda bulanan Perbanas, BMPD, dan FKIJK Jabar. ■



Sosialisasi PSAK 71 dan 73

Implementasi PSAK 71 dan 73 dapat membantu perbankan menjawab tantangan ketidakpastian ekonomi global. Demi meningkatkan pemahaman pelaku industri perbankan terhadap dua kebijakan tersebut, Perbanas melakukan sosialisasi.

Tenggat implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 dan 73 untuk industri perbankan makin dekat. Kedua peraturan itu mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020. Untuk lebih menajamkan pemahaman pelaku industri perbankan terhadap dua kebijakan tersebut, pada 13 Desember 2019 Perbanas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan Chief Financial Officer (CFO) Forum tentang “Implementasi PSAK 71 dan 73” di Hotel Borobudur, Jakarta.

Vera Eve Lim, anggota Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, membuka acara yang dihadiri para profesional perbankan anggota Perbanas, yang tugasnya bersinggungan dengan kedua aturan tersebut. Defri Andri, Kepala Departemen Pengawasan Bank 2 OJK dan Patricia, Deputy Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan Bank Umum OJK, hadir sebagai pembicara yang menyampaikan materi PSAK 71 dan 73 serta regulasi yang melatarbelakanginya. Hadir pula Arief Tjahjono, anggota Bidang Hukum dan Pengaturan Perbanas dan Lisawati, Bendahara Umum Perbanas.

PSAK 71 mengatur perubahan persyaratan terkait dengan instrumen keuangan, seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, serta akuntansi lindung nilai. Peraturan ini mengadopsi konsep *expected loss* yang mempersiapkan potensi kerugian kredit sejak awal dengan mempertimbangkan informasi historis, terkini, dan *forward looking*. Implementasi PSAK 71 memang mewajibkan perbankan untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) lebih.



Dalam implementasinya, bank-bank mulai menghitung PSAK 71 untuk posisi Juli-Desember 2019. Menurut Defri, terdapat peningkatan CKPN yang tinggi setelah penerapan PSAK 71. Ia memperkirakan, kenaikan CKPN industri perbankan secara umum berada di kisaran Rp67 triliun.

Defri juga mengungkapkan, implementasi PSAK 71 dapat menjawab tantangan ketidakpastian global. Melalui PSAK 71, industri perbankan diharapkan mampu bertahan dari dampak ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi. “Wacana dampak global makin meningkatkan potensi ketidakpastian yang makin besar. Ketidakpastian ini harus dicegah melalui laporan keuangan perbankan, dan PSAK 71 jadi kuncinya,” ujar Andri.

Bagaimana dengan penerapan PSAK 73? Terkait dengan PSAK 73 tentang sewa, mayoritas pelaku industri perbankan menganggap kebijakan ini tidak berdampak signifikan, tapi anggapan ini kuranglah tepat. PSAK 73 mengubah secara substansial pembukuan transaksi sewa dari sisi penyewa. Menurut aturan ini, bank harus membukukan hampir seluruh transaksi sewa sebagai sewa finansial (*financial lease*). Sehingga, PSAK 73 dapat berdampak luas karena hampir semua perusahaan memiliki transaksi sewa. ■





PERBANAS INSTITUTE

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PERIODE KULIAH
MARET, JULI, DAN
NOVEMBER 2020



PROGRAM S-1 LANJUTAN PROGRAM STUDI

- S-1 Akuntansi
- S-1 Manajemen
- S-1 Ekonomi Syariah
- S-1 Sistem Informasi

WAKTU PERKULIAHAN

KELAS INTENSIF

Hari Senin - Kamis
Pukul 18.30 - 21.00 WIB

KELAS KARYAWAN

Hari Jumat:
Pukul 18.30 - 21.00 WIB
Hari Sabtu:
Pukul 08.00 - 17.00 WIB

*Khusus Kampus Bekasi:
Sabtu, Pukul 08.00 - 17.00 WIB

PENDAFTARAN ONLINE
admisi.perbanas.id

SEKOLAH PASCASARJANA PROGRAM STUDI

- Magister Akuntansi
- Magister Manajemen
- Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK)

WAKTU PERKULIAHAN

KELAS MALAM

Hari Senin - Kamis
Pukul 18.30 - 21.00 WIB

KELAS AKHIR PEKAN

Hari Sabtu:
Pukul 08.00 - 17.00 WIB

Kampus Jakarta
Telp : (021) 5252533, 5222501-04
ext: 5104 & 5108
Faks : +62 21 5228460 & 5704376
Jl. Perbanas. Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12940

Kampus Bekasi
Telp : (021) 5252533, 5222501-04
8224383, 8224968
Faks : +62 21 5228460 & 5704376
Jl. Cut Meutia Raya No. 2i
Bekasi 17116